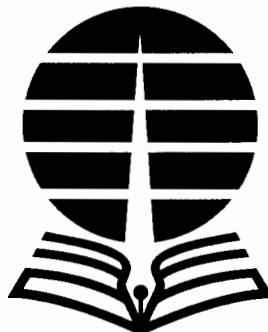




TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

ANALISIS PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DPPKAD KOTA PANGKALPINANG PERIODE 2013 S.D 2015



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Manajemen Dalam Bidang Minat
Manajemen Keuangan**

Disusun Oleh :

LENA MARLENY

NIM. 500629754

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2017

***The Analysis of Revenue and Expenditure in the Financial Management of
DPPKAD Pangkalpinang in the Period of 2013 - 2015***

Lena Marleny
lena.marleny@gmail.com

*Graduate Studies Program
 Indonesia Open University*

Abstract

The purposes of this research are; (1)to analyze revenue in the financial management of DPKKAD Pangkalpinang so it can be known the financial management of Pangkalpinang Local Government; (2) to analyze expenditure in financial management of DPKKAD Pangkalpinang so it can be known the financial management of Pangkalpinang Local Government.

The type of this research is descriptive quantitative research.

The result of this research indicates that; (1) variance analysis is more than favorable variance in 2013 which means that larger difference on revenue realization with a percentage of 1.01 %, overall revenue in the financial management of Pangkalpinang Local Government is said good while in 2014 less variance which is unfavorable variance with the percentage is 0.98 %,overall the revenue in the financial management of Pangkalpinang Local Government is said not good . In 2015 revenue realization that is obtained by Pangkalpinang Local Government with the percentage of 0.93 %, overall revenue in the financial management of Pangkalpinang Local Government is said not good;(2) if it is seen from revenue analysis, the growth of revenue from 2013-2015 goes to positive growth so there is performance improvement in the financial management of Pangkalpinang Local Government; (3) if it is seen from the effectiveness ratio of PAD from 2013 - 2015 then the performance of Pangkalpinang Government is very good above 100%; (4)when looking at the result of variance ratio of expenditure for each period then the performance of financial management of Local Government is good because realization of expenditure is not more than the budget; (5) if it is seen from expenditure efficiency ratio then the performance of Pangkalpinang Government is very good from year to year because of the Government has made budget savings.

Keywords: revenue, expenditure, local financial management

Analisis Penerimaan dan Pengeluaran dalam Pengelolaan Keuangan DPPKAD Kota Pangkalpinang Periode 2013 sd 2015

Lena Marleny

lena.marleny@gmail.com

Universitas Terbuka

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menganalisis penerimaan/ pendapatan dalam pengelolaan keuangan DPPKAD Kota Pangkalpinang sehingga dapat diketahui pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang. (2) Menganalisis pengeluaran/belanja dalam pengelolaan keuangan DPPKAD Kota Pangkalpinang sehingga dapat diketahui pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Analisis varians lebih/selisih yang diharapkan (*favourable variance*) pada tahun 2013 artinya selisih lebih besar pada realisasi pendapatan dengan presentasi sebesar 1,01 % secara keseluruhan penerimaan dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang dikatakan baik sedangkan tahun 2014 varians kurang /selisih yang tidak diharapkan dengan presentasi sebesar 0,98 % secara keseluruhan penerimaan dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang dikatakan belum baik. Tahun 2015 terealisasi penerimaan yang diperoleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan presentasi sebesar 0,93 % secara keseluruhan penerimaan dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang dikatakan belum baik (2) Apabila dilihat dari analisis penerimaan Pertumbuhan pendapatan dari tahun 2013 sd 2015 mengalami pertumbuhan yang positif sehingga adanya peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Pangkalpinang (3) Apabila dilihat dari rasio efektivitas PAD dari Tahun 2013 sd 2015 maka kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang sangat baik dikarenakan diatas 100%. (4) Apabila melihat hasil dari rasio varians belanja setiap periode maka Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah daerah baik karena realiasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan. (5) Apabila dilihat dari rasio efisiensi belanja maka kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang sangat baik dari tahun ketahun dikarenakan Pemerintah sudah melakukan penghematan anggaran.

Kata kunci: penerimaan, pengeluaran,pengelolaan keuangan daerah

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI : MAGISTER MANAJEMEN KEUANGAN**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **Analisis Penerimaan dan Pengeluaran dalam Pengelolaan Keuangan DPPKAD Kota Pangkalpinang Periode 2013 sd 2015** adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Pangkalpinang, April 2017

Yang Menyatakan




(LENI MARLENY)
NIM 500629754

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418
Telp. 021.7415050, Fax 021.7415588

**Kepada
Yth. Direktur PP_s UT
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe
Tangerang 15418**

Yang bertandatangan di bawah ini, Saya selaku pembimbing TAPM dari Mahasiswa,

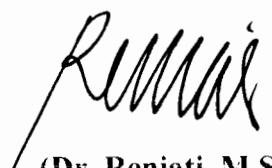
Nama/NIM : Lena Marleny /500629754
Judul TAPM : **Analisis Penerimaan dan Pengeluaran dalam Pengelolaan Keuangan DPPKAD Kota Pangkalpinang Periode 2013 sd 2015**

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa TAPM dari mahasiswa yang bersangkutan sudah/baru* selesai sekitar 92% sehingga dinyatakan **sudah layak uji/belum layak uji*** dalam Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa.

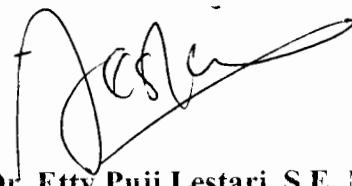
Pangkalpinang, April 2017

Pembimbing I



(Dr. Reniati, M.Si)

Pembimbing II,



(Dr. Etty Puji Lestari, S.E. M.Si)

*) Coret yang tidak perlu

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI : MAGISTER MANAJEMEN KEUANGAN**

PENGESAHAN

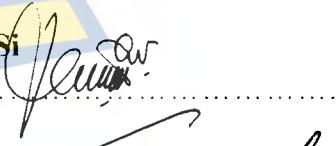
Nama : Lena Marleny
NIM : 500629754
Program Studi : Magister Manajemen Keuangan
Judul Tesis : **Analisis Penerimaan dan Pengeluaran dalam Pengelolaan
Keuangan DPPKAD Kota Pangkalpinang Periode 2013
sd 2015**

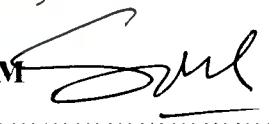
Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Manajemen Keuangan, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Mei 2017
Waktu : 11.00 – 12.30 WIB

dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji : **Dr. Ali Muktiyanto, M.Si** 
Tandatangan

Penguji Ahli : **Dr. Said Kelana Asnawi, M.M** 
Tandatangan

Pembimbing I : **Dr. Reniati, M.Si** 
Tandatangan.....

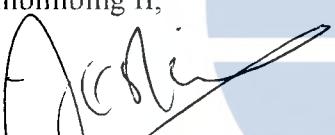
Pembimbing II : **Dr. Etty Puji Lestari, SE,M.Si** 
Tandatangan.....

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : **Analisis Penerimaan dan Pengeluaran dalam Pengelolaan Keuangan DPPKAD Kota Pangkalpinang Periode 2013 sd 2015**

Penyusun TAPM : Lena Marleny
NIM : 500629754
Program Studi : Magister Manajemen Keuangan
Hari/Tanggal :

Menyetujui :

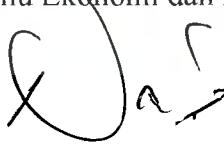
Pembimbing II,

Dr. Etty Puji Lestari, S.E.M.Si
NIP.

Pembimbing I,

Dr. Reniati, M.Si
NIP.

Mengetahui,

Ketua Bidang
Ilmu Ekonomi dan Manajemen


Mohammad Nasoha, S.E., M.Sc
NIP. 19781111 200501 1 001


Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si
NIP. 19581215 198601 1 009

KATA PENGANTAR

Dengan memanajatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang tidak henti peneliti haturkan karena atas taufik dan hidayahNYA jualah peneliti dapat menyelesaikan pembuatan TAPM berjudul Analisis Penerimaan dan Pengeluaran dalam Pengelolaan Keuangan DPPKAD Kota Pangkalpinang Periode 2013 s.d 2015.

Bimbingan dan petunjuk dari Bapak/Ibu selaku dosen Universitas Terbuka maupun dosen pembimbing sangatlah besar sekali bagi peneliti sehingga dengan bimbingan,petunjuk dan motivasi Bapak/Ibu alhamdulillah TAPM ini selesai dengan baik meskipun banyak kekurangan didalamnya semoga Allah SWT yang dapat membalasNYA kebaikan yang telah diberikan.Pepatah mengatakan Tak Ada Gading Yang Tak Retak masukan dan bimbingan sangat diharapkan demi perbaikan untuk penelitian selanjutnya.

Ucapan terima kasih yang tak henti-henti juga peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Dr.Liestyodono B. Irianto, M.Si selaku Direktur Pascasarjana Universitas Terbuka
2. Bapak Adrian Sutawijaya, SE., M.Si selaku Kepala UT Pangkalpinang
3. Bapak Dr. Said Kelana Asnawi,MM selaku Pembahas Ahli
4. Bapak Dr. Ali Muktiyanto.M.Si selaku Ketua Komisi
5. Ibu Dr. Reniati, M.Si selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan,bimbingan,petunjuk,motivasi kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan TAPM ini

6. Ibu Dr. Etty Puji Lestari, M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan,bimbingan,petunjuk,motivasi kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan TAPM ini
7. Bapak Mohammad Nasoha, SE,MSc selaku Ketua Bidang Ilmu Ekonomi dan Manajemen sekaligus dosen yang telah memotivasi peneliti dalam menyelesaikan studi dan TAPM , Ibu Dr. Ceacilia Sri Mindarti, M.Si dan dosen Universitas Terbuka yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu kepada peneliti selama ini.
8. Pihak UPBJJ UT Pangkalpinang yang telah memfasilitasi pembelajaran khususnya Ibu Rosalita Agustini.,S.IP.,M.AP penanggung jawab Pasca UT Pangkalpinang yang telah banyak membantu dalam pembelajaran dan TAPM
9. Doa dan motivasi besar dari kedua orang tuaku tercinta Bak Zuhri Awal , Mak Hazami sehingga memberikan semangat dan tekad yang kuat untuk menyelesaikan belajar dan TAPM
10. Eyang Kesih dan Alm Eyang Sumarno yang telah mendoakan peneliti dalam menyelesaikan TAPM
11. Suami anak-anakku tercinta yang telah menemani suka duka, memberikan doa,motivasi sehingga dapat menyelesaikan belajar dan TAPM
12. Kakak dan ayukku tercinta yang telah mendoakan peneliti sehingga selesai dalam pembuatan TAPM
13. Bapak Iskandar AidulFitri SE selaku Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang yang telah mengizinkan pengambilan data

14. Ibu Shendi Aditia SE selaku Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah yang telah mengizinkan pengambilan data
15. Ibu Sri Narulita SH selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah yang telah mengizinkan pengambilan data
16. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu sehingga peneliti dapat menyelesaikan TAPM. Robi Pranajaya, adek Zein, adek Agung dan adekku Fiyar Hanto dan Siti Jamilah dari awal perkuliahan sampai terselesaikan TAPM, semoga persahabatan Trio MM (Emil,Leny,Fiyar) kekal sampai akhir hayat.aamiin
17. Teman-teman kantor Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang serta stafku (Alma Tri Lestari, Lana, Ayi) serta pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu sehingga peneliti dapat menyelesaikan TAPM ini
Penulis sangat berharap TAPM ini berguna bagi bagi mahasiswa maupun Pemerintah khususnya dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Demikian penelitian ini disampaikan, kritik dan saran yang membangun diharapkan demi perbaikan dalam penyusunan TAPM/Tesis nantinya.

Pangkalpinang, April 2017

Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman

Abstract.....	ii
Abstrak.....	iii
Pernyataan.....	iv
Lembar Layak Uji.....	v
Lembar Pengesahan	vi
Lembar Persetujuan TAPM	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xiii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Grafik.....	xv
Daftar Lampiran.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Landasan Teori	12
1. Penerimaan.....	13
2. Pengeluaran.....	23
3. Bendahara Umum Daerah.....	25
4. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	26

B. Penelitian Terdahulu	31
C. Kerangka Berpikir.....	35
D. Operasionalisasi Variabel	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	38
B. Populasi dan Sampel	38
C. Instrumen Penelitian	39
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	40
E. Metode Analisis Data	41
1. Analisis Penerimaan/Pendapatan	42
2. Analisis Pengeluaran.....	43
BAB IV Hasil dan Pembahasan	45
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	45
1. Gambaran Umum DPPKAD	45
1.1 Visi, Misi DPPKAD.....	46
1.2 Struktur Organisasi	48
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	51
B. Hasil	69
1. Penerimaan.....	71
2. Pengeluaran.....	73
C. Pembahasan.....	74
1. Analisis Penerimaan/Pendapatan	74
2. Analisis Pengeluaran.....	87
Bab V Kesimpulan dan Saran	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	105

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1	Struktur Pengelolaan Keuangan Daerah.....	26
Gambar 2.2	Skema Kerangka Pemikiran	36
Gambar 4.1	Struktur Organisasi.....	50

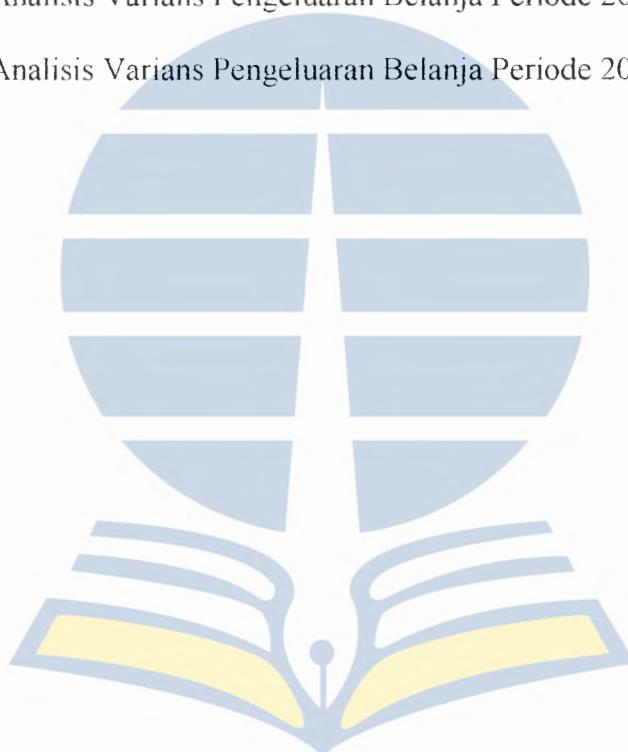


DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel	3.1	Instrumen Penelitian.....
Tabel	4.1	SKPD dan Bendahara di Pemerintah Kota Pangkalpinang 70
Tabel	4.2	Jenis Pajak/Retribusi Daerah..... 71
Tabel	4.3	Analisis Varians Periode 2013 75
Tabel	4.4	Analisis Varians Periode 2014 77
Tabel	4.5	Analisis Varians Periode 2015 79
Tabel	4.6	Pertumbuhan Pendapatan Periode 2013 sd 2015..... 85
Tabel	4.7	Rasio Efektivitas Periode 2013 sd 2015..... 86
Tabel	4.8	Analisis Varians Belanja Periode 2013 87
Tabel	4.9	Analisis Varians Belanja Periode 2014 91
Tabel	4.10	Analisis Varians Belanja Periode 2015 94
Tabel	4.11	Rekapitulasi Varians Belanja Periode 2013 sd 2014..... 98
Tabel	4.12	Rasio Efisiensi Periode 2013 sd 2015 99

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 4.1 Analisis Varians Penerimaan Periode 2013	76
Grafik 4.2 Analisis Varians Penerimaan Periode 2014	78
Grafik 4.3 Analisis Varians Penerimaan Periode 2015	80
Grafik 4.4 Analisis Varians Pengeluaran Belanja Periode 2013	88
Grafik 4.5 Analisis Varians Pengeluaran Belanja Periode 2014	92
Grafik 4.6 Analisis Varians Pengeluaran Belanja Periode 2015	95



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1	Komposisi Target Anggaran Penerimaan Pemerintah Kota Pangkalpinang Periode 2013	108
Lampiran 2	Komposisi Target Anggaran Penerimaan Pemerintah Kota Pangkalpinang Periode 2014	115
Lampiran 3	Komposisi Target Anggaran Penerimaan Pemerintah Kota Pangkalpinang Periode 2015	122
Lampiran 4	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Pangkalpinang Periode 2013	129
Lampiran 5	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Pangkalpinang Periode 2014	136
Lampiran 6	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Pangkalpinang Periode 2015	143
Lampiran 7	Komposisi Target Anggaran Pengeluaran Pemerintah Kota Pangkalpinang Periode 2013	150
Lampiran 8	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Pangkalpinang Periode 2013	151
Lampiran 9	Komposisi Target Anggaran Pengeluaran Pemerintah Kota Pangkalpinang Periode 2014	152
Lampiran 10	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Pangkalpinang Periode 2014	153
Lampiran 11	Komposisi Target Anggaran Pengeluaran Pemerintah Kota Pangkalpinang Periode 2015	154
Lampiran 12	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Pangkalpinang Periode 2016	155

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pemerintahan pada dasarnya adalah perusahaan yang menghasilkan produk berupa jasa pelayanan, baik pelayanan yang bersifat langsung dinikmati oleh masyarakat maupun pelayanan yang secara tidak langsung dinikmati masyarakat. Salah satu tugas layanan pemerintah yang seharusnya diberikan kepada masyarakat adalah transparansi dan pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan. Krisis ekonomi yang berawal pada pertengahan tahun 1997 lalu membuat kondisi perekonomian Indonesia terpuruk. Sejak reformasi digulirkan yang diikuti dengan perubahan berbagai ketentuan peraturan perundangan salah satunya adalah yang mengamanatkan pentingnya penyajian laporan keuangan pemerintah sebagai bagian dari transparansi. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka diberi kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangannya sendiri.

Pemerintah daerah terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih memberikan pelayanan publik yang didasarkan pada asas-asas pelayanan publik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban demi tercapainya *Good Governance*.

Pemerintah suatu negara yang sukses dipengaruhi oleh ada tidaknya karakter *Good Governance*. *Good Governance* merupakan praktik analisis kewenangan berbagai urusan penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif disemua tingkatan. Dalam perubahan sistem pemerintah dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi pada bentuk ekonomi daerah telah memberi dampak besar pada sistem penyelenggaraan pemerintah dan ruang lingkup kinerja. Menurut *World Bank*, *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Akuntabilitas publik dalam *good governance* merupakan elemen terpenting dan merupakan tantangan utama yang dihadapi pemerintah dan pegawai negeri.

Di Indonesia termuat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 55 tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya, penatausahaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai pemerintah daerah juga terdapat paket undang-undang dibidang keuangan negara yang menjadi dasar

dalam pengelolaan keuangan negara. Undang-undang tersebut antara lain undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lahirnya paket undang-undang bidang keuangan negara tersebut menandai mulai bergulirnya reformasi dibidang keuangan negara.

Pencapaian tujuan bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah, ada masalah atau persoalan yang akan dihadapi oleh pemerintah untuk mencapainya salah satunya yaitu masalah Pengelolaan keuangan. Dalam hal pengelolaan uang publik masyarakat akan semakin cerdas dalam menuntut transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan tuntutan publik yang harus direspon secara positif.

Transparansi pengelolaan keuangan publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual sehingga informasinya dapat digunakan sebagai berikut :

1. Membandingkan kinerja keuangan yang akan dicapai dengan yang direncanakan (realisasi vs anggaran)
2. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran
3. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait
4. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu antara pemerintah dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait

Masalah pengelolaan keuangan publik atau pemerintah dinyatakan dalam masalah pendapatan/penerimaan, masalah belanja/pengeluaran , dan masalah

penanganan kelebihan pendapatan diatas belanja (surplus) atau masalah kelebihan belanja diatas pendapatan (defisit) yang dikenal dengan masalah pembiayaan. Masalah tersebut tercermin dalam manajemen anggaran pendapatan dan belanja, pada tingkat daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu penerimaan dan pengeluaran sangat diperlukan pada pengelolaan keuangan DPPKAD Kota Pangkalpinang.

Penelitian dilakukan Saputra dkk (2016), Hasil penelitiannya pertama dilihat dari varian/selisih pendapatan termasuk kategori baik, kedua dilihat dari rasio derajat desentralisasi termasuk dalam kategori sangat kurang, ketiga dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah termasuk dalam kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif, keempat dilihat dari pertumbuhan pendapatan dikategorikan pertumbuhan positif karena pemerintah daerah mampu mempertahankan bahkan meningkatkan pencapaian dari tahun sebelumnya, kelima dilihat dari varian/selisih belanja daerah termasuk kategori baik, dilihat dari keserasian belanja disimpulkan bahwa pemerintah lebih banyak menggunakan anggaran belanjanya untuk keperluan operasional, ketujuh dilihat dari efisiensi belanja pemerintah daerah Kabupaten Jembrana dikategorikan efisien dalam menggunakan anggaran belanja daerah.

Artikel Susanto (2014) Analisis mengenai perkembangan kinerja keuangan daerah dalam upaya mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Propinsi Nusa Tenggara Barat . Hasil penelitiannya bahwa rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi NTB selama periode tahun anggaran 2003-2007 adalah 54,58 % dikatagorikan dengan kriteria Provinsi dengan tingkat kemandirian

keuangan di daerah Sangat Kurang, Rata-rata tingkat ketergantungan keuangan daerah Provinsi NTB terhadap pemerintah pusat pada kurun waktu periode tahun anggaran 2003-2007 adalah 77,93 %, yakni Provinsi dengan tingkat ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi, Rata-rata tingkat desentralisasi fiskal Provinsi NTB periode tahun anggaran 2003-2007 adalah 32,61 % sehingga dikategorikan sebagai Provinsi dengan tingkat desentralisasi fiskal Cukup. Tingkat efektivitas dari pendapatan daerah memiliki kecenderungan Sangat Efektif dengan tingkat efektivitas diatas 100 %, karena efektivitas pendapatan daerah tahun anggaran 2003-2007 diperoleh rata-rata sebesar 102,14. Tingkat efisiensi dari belanja daerah Provinsi NTB memiliki kecenderungan Tidak Efisien, dengan tingkat efisiensi di atas 100 %, yaitu 109,93 %.

Persoalan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan adalah bagaimana mendapatkan uang atau dana (penerimaan/pendapatan) dan bagaimanakah menggunakan uang atau dana (pengeluaran/belanja) sehingga akan diketahui pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Penelitian oleh Prabowo (2012) dalam tesis analisa pengelolaan kas daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (studi kasus di Pemerintah Provinsi DIY). Tujuan penelitian untuk mengetahui kondisi dan menganalisis keadaan kas daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Ibukota Yogyakarta. Hasil penelitian yaitu Keleluasaan Penyusunan APBD Propinsi Daerah Ibukota Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang syah disamping upaya peningkatan pencapaian target penerimaan, perencanaan

pengelolaan kas yang efisien dan efektif dan keberhasilan pencapaiannya dipengaruhi peran SKPD pengelola penghasil PAD serta SKPD Pendamping. Peningkatan pendapatan juga dapat dilakukan dengan pengelolaan aliran kas yang lebih kreatif dengan memanfaatkan *idle cash* yang ada untuk diinvestasikan pada deposito berjangka (*ON Call*) maka pendapatan akan dapat ditingkatkan tanpa membebani pada pungutan masyarakat.

Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi, dimana Kepala Daerah diserahkan urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan otonomi daerah yang menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang.

Pemerintahan Kota Pangkalpinang merupakan organisasi non profit yang memiliki tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai bidang. Pelaksanaan Pemerintah Kota Pangkalpinang dipimpin oleh Walikota selaku Bendahara Umum Daerah yang mendeklegasikan tugasnya melalui pejabat di lingkungan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan permasalahan penting dalam kehidupan bernegara juga diatur dalam paket undang-undang. Undang-undang tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lahirnya paket undang-undang bidang keuangan negara tersebut menandai mulai bergulirnya reformasi dibidang keuangan negara.

Halim (2010) menyatakan bahwa "Pengelolaan Keuangan adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan,pelaporan,pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang kemudian hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah (APBD atau ditingkat pusat APM) yang dikelola dalam pengelolaaan keuangan daerah secara efisien, efektif,transparan, akuntabel, tertib, adil,patut dan taat pada peraturan perundang-undangan"

Keuangan daerah dalam arti sempit identik dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri)

13 tahun 2006 disebutkan bahwa semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD adalah rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Pemerintah daerah menyusun dan melaksanakan anggaran daerah untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada publik. Kualitas pelayanan tersebut sangat tergantung pada kelancaran pendanaan untuk membiayai semua aktivitas yang dilakukan. Dalam hal ini pemerintah daerah harus dapat mengelola sumberdaya yang dimilikinya dengan sebaik mungkin. Dengan demikian, unit kerja yang memberikan pelayanan kepada publik sedapat mungkin tidak berhadapan dengan masalah kekurangan atau ketiadaan dana ketika dibutuhkan.

Artinya, dana yang dibutuhkan oleh unit kerja semestinya tersedia dalam jumlah yang cukup tepat pada waktunya.

Persoalan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan adalah bagaimana mendapatkan uang atau dana (penerimaan/pendapatan) dan bagaimanakah menggunakan uang atau dana (pengeluaran/belanja) sehingga akan diketahui pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Pemerintah daerah kemudian membentuk suatu unit kerja yang melaksanakan fungsi perbendaharaan, yang mencakup perencanaan, penerimaan, penatausahaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban kas daerah, yang disebut dengan nama bendahara daerah. Peraturan perundang-undangan terbaru dikenal dengan nama bendahara umum daerah (BUD).

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan mengkaji analisis penerimaan dan pengeluaran dalam pengelolaan keuangan DPPKAD Kota Pangkalpinang periode 2013 s.d 2015

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi penelitian ini, maka penulis membatasi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah analisis penerimaan/pendapatan dalam pengelolaan keuangan DPPKAD Kota Pangkalpinang periode 2013 s.d 2015 ?
2. Bagaimanakah analisis pengeluaran/belanja, dalam pengelolaan keuangan DPPKAD Kota Pangkalpinang periode 2013 s.d 2015 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Menganalisis penerimaan/pendapatan dalam pengelolaan keuangan DPPKAD Kota Pangkalpinang sehingga dapat diketahui pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang
2. Menganalisis pengeluaran/belanja dalam pengelolaan keuangan DPPKAD Kota Pangkalpinang sehingga dapat diketahui pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini, selain untuk penulis sendiri, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak lainnya:

1. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian yang erat kaitannya dengan Manajemen Keuangan ini diharapkan mampu lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis atas teori yang dikaji dalam kaitannya dengan disiplin ilmu Manajemen Keuangan juga sebagai syarat bagi kelulusan dalam program Magister.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan referensi bagi penelitian-penelitian sejenis selanjutnya.

3. Manfaat Implementasi

Penelitian ini memfokuskan kepada para pengambil kebijakan dalam lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah maupun pihak-pihak lain yang

berkepentingan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Manajemen Keuangan. Manajemen Keuangan (*Financial Management*) merupakan manajemen yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan masalah keuangan atau pendanaan. Jadi manajemen keuangan sering didefinisikan sebagai cara merencanakan, menganggarkan, memeriksa, mengelola, mengendalikan, mencari dan menyimpan dana atau bagi sebuah lembaga atau perusahaan (Poppy Alexano, 2012:41).

Middle Theory dalam penelitian menggunakan Teori Penerimaan dan Pengeluaran. Penerimaan adalah penerimaan yang secara langsung diterima pada kas umum daerah dan Pengeluaran adalah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan pada tingkat pemerintah daerah/uang yang keluar dari kas daerah. Saldo kas daerah adalah Saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.

Applied Theory adalah Pengelolaan Keuangan DPPKAD Kota Pangkalpinang. Keuangan daerah dalam arti sempit identik dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) 13 tahun 2006 disebutkan bahwa semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas

desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD adalah rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD.

1. Penerimaan

Penerimaan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) atau Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) merupakan penerimaan yang secara langsung diterima pada kas umum daerah (Hafiz Tanjung,2011:280). Penerimaan-penerimaan tersebut berupa pendapatan dana perimbangan, pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan Dokumen Pelaksana Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (DPA PPKD) dan penerimaan pembiayaan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefinisikan pendapatan sebagai semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

1.1 Penerimaan Daerah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Mahmudi (2016) menyatakan bahwa “ Penerimaan daerah adalah semua jenis penerimaan kas yang masuk ke rekening kas daerah baik yang murni berasal dari pendapatan daerah maupun dari penerimaan pembiayaan”.

1.1.1. Penerimaan Asli Daerah

Menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004 pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 angka 18).

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- a. Pajak Daerah.

Jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 UU Nomor 28 tahun 2009 dibagi ke dalam sebelas jenis pajak kabupaten/kota yaitu

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak parkir
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang walet

10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
 11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
- b. Retribusi Daerah.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, yang mencakup: bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah (BUMN), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.
- d. Lain-lain PAD yang Sah, yang meliputi:
1. Hasil pemakaian atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 2. Jasa giro
 3. Pendapatan bunga
 4. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah
 5. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 6. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
 7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
 8. Pendapatan denda pajak dan retribusi
 9. Pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum
 10. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
 11. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.

Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam upaya penggalian sumber-sumber pendapatan daerah bukanlah tanpa masalah. Analisis terhadap objek-objek pendapatan sering tidak berjalan seperti yang diharapkan karena alasan keterbatasan kemampuan sumber daya yang dimiliki dan seringnya rotasi atau mutasi para pejabat-pejabat pemerintah yang berakibat pada banyaknya program-program strategis pemerintah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut Yunanto (2010) yang dikutip dari penelitian Santosa (1995), ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya pendapatan asli daerah yaitu :

1. Banyaknya sumber pendapatan kabupaten/kota yang besar tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi
2. Badan usaha milik daerah (bumd) belum banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah
4. Adanya kebocoran-kebocoran
5. Adanya biaya pungut yang masih tinggi
6. Banyaknya peraturan daerah yang belum disesuaikan dan disempurnakan
7. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sangat rendah
8. Perhitungan potensi tidak dilakukan

Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, potensi sumber pendapatan terbesar penyumbang pendapatan asli daerah bagi rata-rata pemerintah daerah di Indonesia adalah dari

sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

1.1.2. Dana Perimbangan (Transfer)

Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan meliputi : Dana alokasi umum dana alokasi khusus dan dana bagi hasil, yang meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak.

1.1.3. Pendapatan Lain-Lain yang Sah

Pendapatan lain-lain yang sah meliputi: pendapatan hibah, pendapatan dana darurat,dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, bantuan keuangan. Pendapatan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian, dan dana otonomi khusus.

1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB)

Penerimaan negara bukan pajak (PNPB) merupakan lingkup keuangan negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga auditor eksternal yang bebas dan mandiri turut melakukan pemeriksaan atas komponen yang mempengaruhi pendapatan negara dan merupakan penerimaan negara sesuai dengan undang-undang (UU) (Halim,2016).Laporan hasil pemeriksaan BPK kemudian diserahkan kepada DPR, DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah menyadari akan pentingnya Penerimaan negara bukan pajak (PNPB) maka kemudian dilakukan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya melalui:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari kegiatan Tertentu
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah Pembayaran , dan Penyetoran penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang

Penerimaan negara bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan (Halim,2016). Penerimaan negara bukan Pajak (PNPB) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 dapat dikelompokan kedalam :

- a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolahan dana pemerintah
- b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam (sda)
- c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolahan kekayaan negara yang dipisahkan
- d. Penerimaan di kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah
- e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi
- f. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah
- g. Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri

Pengelompokan Penerimaan negara bukan Pajak (PNBP) ini kemudian ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 dengan menjabarkan jenis-jenis Penerimaan negara bukan Pajak (PNBP) yang berlaku umum disemua departement dan lembaga non departement disebut Penerimaan negara bukan Pajak (PNBP) Umum yaitu

- a. Penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran rutin dan sisa anggaran pembangunan)
- b. Penerimaan hasil penjualan barang / kekayaan negara
- c. Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara
- d. Penerimaan asil penyimpanan uang negara (jasa giro)
- e. Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan bendaharaan)
- f. Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah
- g. Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang

Penerimaan negara bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari hasil pungutan kementerian /lembaga (K/L) negara atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya disebut “PNBP Fungsional ” yang terdiri dari

- a. Penerimaan yang bersumber dari pegelolahan dana pemerintah
- b. Penerimaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam
- c. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah
- d. Penerimaan berdasarkan putusa pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi

e. Penerimaan beupah hibah yang merupakan hak pemerintahan

f. Penerimaan lainnya yang diatur tersendiri

Tarif atas jenis Penerimaan negara bukan Pajak (PNBP) ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehubungan dengan jenis PNBP yang bersangkutan , dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.

Penerimaan negara bukan Pajak (PNBP) memiliki beberapa fungsi , yaitu sebagai berikut:

- a. Fungi Budgeter, hal ini didasarkan karena Penerimaan negara bukan Pajak (PNBP) merupakan sumber penerimaan negara yang diperoleh setelah memberikan pelayanan jasa atau menjual barang milik negara oleh kementerian/lembaga negara kepada masyarakat.Penerimaan ini dapat pula berasal dari pungutan dalam bentuk iuran,retibusi,sumbangan atau pungutan
- b. Fungsi Regulasi , yaitu PNBP dapat pula berfungsi sebagai sarana untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam berbagai aspek dalam rangka menggerakan roda pembangunan.

Penerimaan negara bukan Pajak (PNBP) dipungut dan ditagih oleh instansi pemerintah (departemen dan lembaga non department) sesuai dengan perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah atau penunjukan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia , berdasarkan rancana Penerimaan negara bukan Pajak (PNPB) (hasil perhitungan / penetapan PNBP yang diperkirakan akan diterima dalam satu tahun yang akan datang) yang dibuat oleh pejabat instansi pemerintah tersebut .PNPB yang telah dipungut atau ditagih tersebut wajib

dilaporkan secara tertulis oleh pejabat instansi pemerintah kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam bentuk laporan realisasi Penerimaan negara bukan Pajak (PNPB) triwulan (daftar yang memuat PNPB yang telah dicapai atau diperoleh dalam periode tertentu) yang disampaikan paling lambat satu bulan setelah triwulan tersebut berakhir.

Namun dalam perkembangan selanjutnya . menurut surat Edaran Sekretaris Jenderal Departement Keuangan (Depkeu) Republik Indonesia Nomor S-389/SJ/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-05/PJ.12/2006 tentang Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak ,instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan bulanan realisasi PNBP setiap tanggal 10 bulan berikutnya Kepada Sekretaris Jenderal u.p Biro Perencanaan dan serta tembusan disampaikan kepada Sekretaris Dirjen Pajak u.p Kepala Bagian Keuangan . Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara dan dikelolah dalam sistem APBN.

PNBP memiliki sifat segera harus disetorkan ke kas negara,namun sebagian dana dari PNBP yang telah dipungut dapat digunakan untuk kegiatan tertentu(meliputi bidang-bidang kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi ,pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan ,penegakan hukum ,pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu dan pelestarian SDA) oleh Instansi yang bersangkutan .Pemberian izin penggunaan dan besaran jumlah ditentukan oleh Menteri Keuangan RI melalui keputusan Menteri Keuangan .

setelah pimpinan Instansi pemerintah mengajukan permohonan yang minimal dilengkapi dengan:

- a. Tujuan penggunaan dana PNBP antara lain untuk meningkatkan pelayanan , meningkatkan kualitas sumber daya manusia ,meningkatkan produktifitas kerja serta meningkatkan efisiensi perekonomian
- b. Rincian kegiatan pokok instansi dan kegiatan yang akan dibiayai Penerimaan Negara Bukan Pajak
- c. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak beserta tarif yang berlaku
- d. Laporan realisasi dan perkiraan tahun anggaran berjalan serta perkiraan untuk dua tahun anggaran mendatang.

Kegiatan penatausahaan sebagian dana dari PNBP dilakukan oleh pimpinan instansi / bendaharawan penerima dan bendaharawan pengguna yang ditunjuk pada setiap awal tahun anggaran apabila terdapat saldo lebih maka pada akhir tahun anggaran wajib disetorkan kembali seluruhnya kedalam kas negara.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus dibayar pada waktu tertentu atau dalam satu periode tertentu atau dalam suatu periode tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut "Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang" Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang ditentukan dengan cara ditetapkan oleh instansi pemerintah antara lain pemberian paten,pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan,dan penjualan karcis masuk atau sendiri oleh wajib bayar , antara lain pemanfaatan Sumber Daya Alam. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Petunjuk pelaksanaan terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak terutang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah,Pembayaran , dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang,dihitung dengan menggunakan tarif.

- a. Spesifik, adalah yang ditetapkan dengan nilai nominal uang
- b. Advalorem , adalah tarif yang ditetapkan dengan persentase (%) dikalikan dengan satuan nilai (berupa harga patokan, indeks harga,kurs,pendapatan kotor atau penjualan bersih) yang digunakan sebagai dasar perhitungan
- c. Ketentuan perundang-undang. Dalam hal ini penetapan berdasarkan formula, kontrak ,putusan pengadilan,dan hasil lelang

2. Pengeluaran

Pengeluaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) atau Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) merupakan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan pada tingkat pemerintah daerah (Hafiz Tanjung,2011:287).

2.1 Pengeluaran Daerah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

2.1.1. Belanja

Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan belanja daerah sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Semua belanja harus dianggarakan dalam APBN/APBD, yang merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut belanja langsung dan belanja tidak langsung , yang dirinci lagi menjadi belanja operasi, belanja tidak terduga,belanja transfer dan belanja modal. Pengakuan dan pencatatan belanja daerah didasarkan pada basis kas (*cash basis*).

Belanja Operasi meliputi :

1. Belanja pegawai
2. Belanja Barang
3. Bunga
4. Subsidi
5. Hibah
6. Bantuan Sosial



Belanja Tidak Terduga meliputi :

1. Bantuan bencana alam
2. Bantuan bencana sosial
3. Bantuan bencana politik

Belanja tidak terduga atau belanja lain-lain merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak berulang atau rutin terjadi.

Belanja Modal meliputi :

1. Belanja Tanah

2. Belanja Peralatan dan mesin
3. Belanja gedung dan bangunan
4. Belanja jalan, irigasi dan jaringan
5. Belanja aset tetap lainnya
6. Belanja aset lainnya

Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan bagian dari belanja pemerintah daerah. Untuk Pemerintah Provinsi pengeluaran transfer berupa transfer/bagi hasil pendapatan ke Kabupaten/Kota yang meliputi :

1. Bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota
2. Bagi hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota
3. Bagi hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota

Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota pengeluaran transfer berupa transfer/bagi hasil pendapatan ke desa yang meliputi

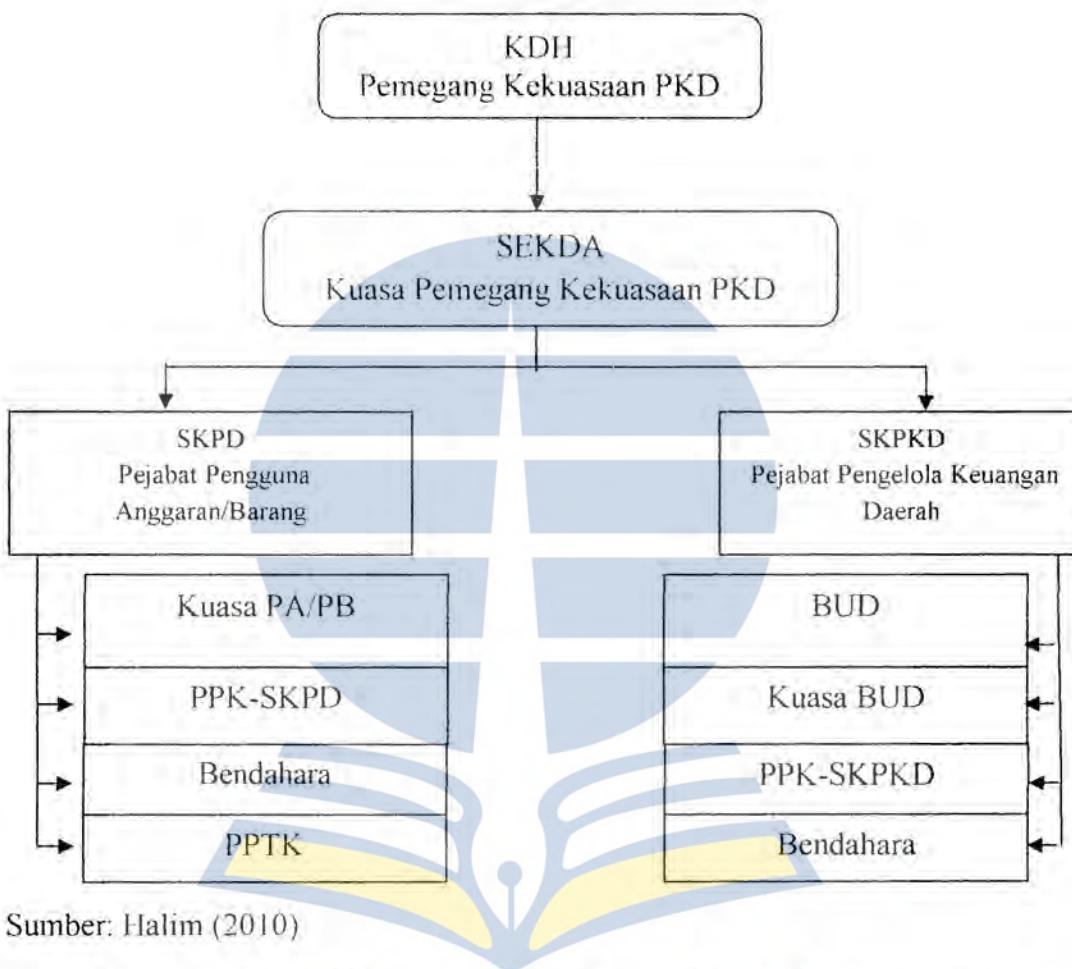
1. Bagi hasil Pajak
2. Bagi hasil retribusi
3. Bagi hasil pendapatan lainnya

3. Bendahara Umum Daerah

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Bendahara Umum Daerah. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan uang dan surat berharga (Murwanto,Insyafilah,Subkhan,2006)

4. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Gambar 2.1
Struktur Pengelolaan Keuangan Daerah



Sumber: Halim (2010)

Menurut Halim (2010) menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang kemudian hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan

pembentukan daerah (APBD atau ditingkat pusat APM) yang dikelola dalam pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut dan taat pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal pengelolaan uang publik, masyarakat akan semakin cerdas dalam menuntut transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan tuntutan publik yang harus direspon secara positif.

Keuangan daerah dalam arti sempit identik dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) 13 tahun 2006 disebutkan bahwa semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

4.1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (DPA-SKPD)

Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembentukan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 angka 61).

4.2. Penyusunan Anggaran Kas

Penyusunan anggaran kas pemerintah daerah dilakukan guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah disahkan. Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk dan perkiraan arus kas keluar. Anggaran kas mempunyai peranan penting sebagai alat kontrol dan pengendalian. Dalam Permendagri 13 Tahun 2006 paragraf 2 tentang anggaran kas pasal 125 menyatakan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan rancangan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rancangan anggaran kas Satuan Kerja Perangkat Daerah kemudian disampaikan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) bersamaan dengan rancangan memenuhi Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pembahasan rancangan anggaran kas Satuan Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.3 Surat Penyediaan Dana (SPD)

Surat Penyediaan Dana dibuat oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Bendahara Umum Daerah (BUD) harus mampu memperkirakan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Surat Penyediaan Dana (SPD) digunakan untuk menyediakan dana bagi tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam periode waktu tertentu.

4.4 Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD), bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui pejabat penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diajukan dengan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar jumlah yang diminta untuk dibayarkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.5 Surat Perintah Membayar (SPM)

Proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) adalah tahap penting dalam penatausahaan pengeluaran yang merupakan tahap lanjutan dari pengajuan SPP. Surat Perintah Membayar juga terdiri dari 4 jenis yaitu Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU) dan Pembayaran Langsung (LS).

4.6 Surat Perintah Pecairan Dana (SP2D)

SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana melalui bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD. SP2D sifatnya spesifik yaitu satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM.

4.7 Pelaksanaan Belanja

Pelaksanaan belanja yang dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan wajib dipertanggungjawabkan oleh PPTK secara tepat waktu dengan didukung oleh dokumen-dokumen pendukung. Dokumen tersebut diberikan pada bendahara pengeluaran sebagai dasar pembuatan SPJ dan mencatat pelaksanaan belanja tersebut dalam: Buku kas umum pengeluaran, Buku pembantu pengeluaran

perincian objek, Buku pembantu kas tunai, Buku pembantu panjar, Buku pembantu pajak.

4.8 Surat Pertanggungjawaban Pengeluaran

Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan/ganti/tambah UP kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Dokumen laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas pengelolaan UP adalah Buku Kas Umum pengeluaran, ringkasan per rincian obyek, bukti penyetoran PPN/PPh ke kas daerah dan register penutupan kas. Selain melakukam pertanggungjawaban administratif, bendahara juga harus membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dikirimkan ke BUD dalam rangka pertanggungjawaban fungsional.

4.9 Dokumen yang digunakan dalam Pelaksanaan Penerimaan

1. Surat tanda setoran (STS) digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada SKPD
2. Nota kredit bank, dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas
3. Bukti transfer merupakan bukti atas transfer penerimaan daerah
4. Surat ketetapan pajak daerah digunakan untuk menetapkan pajak daerah atas wajib pajak yang dibuat oleh PPKD
5. Surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) digunakan untuk menetapkan retribusi daerah atas wajib retribusi yang dibuat oleh pengguna anggaran

6. Surat Tanda Bukti Penerimaan (STBP) digunakan untuk mencatat setiap penerimaan dari pihak ketiga yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan
7. Buku jurnal penerimaan kas merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas
8. Buku besar adalah catatan untuk memposting semua transaksi selain kas dari jurnal penerimaan kas ke buku besar untuk setiap rekening aset,kewajiban, ekuitas dana,pendapataan,belanja dan pembiayaan
9. Buku besar pembantu adalah catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat semua transaksi atau kejadian yang berisi rincian akun buku besar untuk setiap rekening yang dianggap perlu

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu dasar diadakan penelitian sesudahnya, dan untuk melihat apakah hasil penelitian tersebut sama dan relevan jika diterapkan pada objek penelitian lainnya. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian berjudul analisis penerimaan, pengeluaran dalam pengelolaan keuangan DPPKAD Kota Pangkalpinang dijelaskan berikut ini.

Penelitian yang dilakukan Saputra dkk (2016) meneliti analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitiannya menyimpulkan pertama dilihat dari varian/selisih pendapatan termasuk kategori baik, kedua dilihat dari rasio derajat desentralisasi termasuk dalam kategori sangat

kurang, ketiga dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah termasuk dalam kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif, keempat dilihat dari pertumbuhan pendapatan dikategorikan pertumbuhan positif karena pemerintah daerah mampu mempertahankan bahkan meningkatkan pencapaian dari tahun sebelumnya, kelima dilihat dari varian/selisih belanja daerah termasuk kategori baik, dilihat dari keserasian belanja disimpulkan bahwa pemerintah lebih banyak menggunakan anggaran belanjanya untuk keperluan operasional, ketujuh dilihat dari efisiensi belanja pemerintah daerah Kabupaten Jembrana dikategorikan efisien dalam menggunakan anggaran belanja daerah.

Penelitian yang dilakukan Languju dkk (2015) meneliti evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif. Hasil Penelitiannya yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melaksanakan sistem dan prosedur pengeluaran kas secara efektif dan sudah sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2006.

Penelitian yang dilakukan Vurry dkk (2014) meneliti analisis kemampuan keuangan daerah dan trend pada Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2004-2013. Penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah termasuk dalam kategori rendah sekali, kedua yaitu rasio efektivitas PAD termasuk dalam kategori sangat efektif, ketiga yaitu rasio efisiensi PAD termasuk dalam kategori sangat efisien, keempat yaitu rasio IKR termasuk dalam kategori sangat kurang dan kelima trend kemandirian keuangan, efektivitas,IKR

menunjukkan arah perkembangan yang positif begitupula dengan peramalannya di tahun 2014-106 dan trend efisiensi menunjukkan arah perkembangan negatif begitu pula dengan peramalan ditahun 2014-2016.

Penelitian yang dilakukan Rinaldi (2012) dalam Artikel Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Hasil Penelitian yaitu Kemampuan keuangan Kabupaten Bengka yang menunjukkan rasio yang rendah, untuk Total Penerimaan Daerah (TPD) rasio kemandirian dibawah 25,39%. Derajat Otonomi Fiskal (DOF) rasio kemandirian dibawah 10%. Tingkat Rasio Dana alokasi Umum (RDAU) rata-rata 69,94%. Indeks Kemampuan Rutin (IKR) rata-rata 147,820%, Rasio Ketergantungan Keuangan rata-rata 82,42%. Rasio pembiayaan rata-rata 3,10%. Artinya pola hubungan yang instruktif bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan melalui dana perimbangan dari pada kemandirian pemerintah daerah dalam APBD.

Penelitian yang dilakukan Wenny (2012) meneliti Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun, secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian yang dilakukan Subekti (2010) dalam tesis pengelolaan kas daerah untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang dilakukan untuk mengetahui pola penerimaan dan pengeluaran daerah dan prediksi ditahun-tahun berikutnya. Hasil Penelitian yaitu Pengelolaan Kas daerah yang lebih optimal akan memberi dukungan pada peningkatan pendapatan sli daerah .

Penelitian yang dilakukan oleh Anisma dkk (2010). Meneliti evaluasi manajemen pengelolaan kas Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil penelitiannya pertama menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir belum mempunyai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sehingga penerapan pengelolaan keuangan daerah menjadi beraneka ragam. Hasil kedua yaitu Penatausahaan Kas pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang belum sesuai dengan Ketentuan Berlaku. Hasil Ketiga yaitu Pengendalian intern pengelolaan kas pada Bendahara Penerimaan Pemerintah Kabupaten Indragiri adalah lemah.

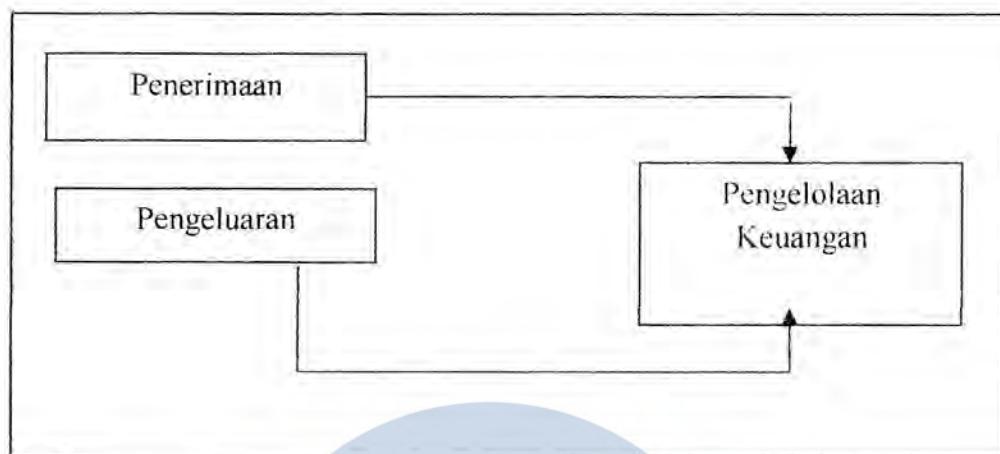
Penelitian yang berhubungan dengan evaluasi kinerja keuangan daerah oleh Bisma dkk (2010). Meneliti evaluasi kinerja keuangan daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. Hasil penelitiannya pertama menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis kinerja keuangan daerah secara umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Tahun Anggaran 2003-2007 menggambarkan kinerja yang tidak optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah, hal ini ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan yang antara lain

Ketergantungan Keuangan Daerah sangat tinggi terhadap Pemerintah Pusat sehingga tingkat kemandirian Daerah Sangat kurang, Desentralisasi fiskal cukup mengingat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Efektifitas pengelolaan APBD Sangat efektif namun efisiensi pengelolaan APBD menunjukkan hasil tidak efisien. Hasil kedua dilihat dari indikator kinerja PAD secara umum sumbangan PAD (share) terhadap total pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007 masih rendah namun pertumbuhan (growth) PAD tinggi. Kendati tetap terjadi peningkatan pada PAD namun apabila dibandingkan dengan peningkatan belanja maka proporsi peningkatan PAD sangat kecil. Hasil ketiga menyimpulkan bahwa berdasarkan pengukuran Indeks Kemampuan Keuangan (IKK), Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada skala indeks 0,54 selanjutnya diklasifikasikan menurut Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah adalah Provinsi dengan kemampuan keuangan tinggi. Tingginya tingkat kemampuan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih disebabkan karena besaran subsidi atau bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui dana perimbangan. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan amanat otonomi daerah yang menunjukkan kemandirian daerah dan kewenangan luas dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga pemerintah daerah.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian sebagai berikut

Gambar 2.2
Skema Kerangka Berpikir



Penerimaan/pendapatan daerah dikatakan baik apabila realisasi pendapatan diatas jumlah yang dianggarkan begitu pula sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarakan maka penerimaan daerah tidak baik sehingga pengelolaan keuangan juga tidak baik.

Pengeluaran/belanja dikatakan baik apabila realisai belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan begitu pula sebaliknya apabila realisasi pengeluaran/belanja melebihi yang dianggarakan maka pengeluaran daerah tidak baik sehingga pengelolaan keuangan juga tidak baik.

Efektivitas pengelolaan keuangan menunjukkan bahwa adanya pencapaian pengelolaan keuangan daerah. Dalam mengukur tingkat efektivitas Mahmudi (2016) yaitu jika tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif, tingkat pencapaian 100% berarti efektif dan tingkat pencapaian antara 90%-99% berarti cukup efektif, tingkat pencapaian antara 75%-89% berarti kurang efektif, tingkat pencapaian dibawah 75% berarti tidak efektif.

D. Operasionalisasi Variabel

1. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Keuangan daerah dalam arti sempit identik dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) 13 tahun 2006 disebutkan bahwa semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.
2. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Penerimaan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) atau Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) merupakan penerimaan yang secara langsung diterima pada kas umum daerah.
3. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pengeluaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) atau Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) merupakan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan pada tingkat pemerintah daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan sejak bulan November 2016 sampai dengan 11 April 2017.

Tempat penelitian adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pangkalpinang yang beralamat di Jl. Batu Intan

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2013:148). Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pangkalpinang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono,2013:149). Dalam penelitian ini teknik yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan metode sampling jenuh. Dikatakan sampling jenuh karena pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan semua jumlah populasi (Sugiyono,2013:156).

Sampel dari penelitian ini adalah bagian dari jumlah populasi yaitu Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1

Instrumen Penelitian

N o	Variabel	Pengukuran	Skala Pengukuran	Keterangan
1	Pengelolaan keuangan	Tercapainya tujuan.tidak adanya penyimpangan dalam prosedur pengelolaan keuangan daerah	Rasio	Tingkat pencapaian jika - diatas 100 berarti sangat efektif - antara 100% berarti efektif - antara 90% -99% berarti cukup efektif - antara 75%-89% berarti kurang efektif - dibawah 75% berarti tidak efektif
2	Penerimaan/pendapatan	Tercapainya penerimaan, tidak adanya penggelapan penerimaan/ pendapatan daerah, tidak adanya kolusi antara petugas pajak dengan wajib pajak, tidak adanya komisi atas penempatan dana yang tidak masuk ke rekening kas daerah,adanya pertumbuhan pendapatan yang positif	Rasio	Realisasi penerimaan/ pendapatan diatas jumlah yang dianggarkan maka kinerja penerimaan/ pendapatan dinilai baik Tingkat pencapaian jika - diatas 100 berarti sangat efektif - antara 100% berarti efektif - antara 90% -99% berarti cukup efektif - antara 75%-89% berarti kurang efektif - dibawah 75% berarti tidak efektif
3	Pengeluaran/Belanja	Tercapainya Pengeluaran/belanja yang baik , tidak ada mark-up dalam belanja, belanja yang dianggarkan tidak melanggar peraturan perundangan, tidak ada penitipan anggaran kesatuan kerja lain	Rasio	Jika realisai belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan berarti baik. Jika rasio efisiensi kurang dari 100% berarti belanja daerah baik Jika rasio efisiensi lebih dari 100% maka penierintah daerah dinilai telah melakukan pemborosan anggaran belanja

D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan dalam rangka memperoleh data-data yang akurat dan relevan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dapat dianalisis dan diperoleh solusi untuk permasalahan yang diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian pustaka dikumpulkan dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan laporan-laporan, majalah ilmiah, jurnal, diktat-diktat kuliah, Surat Keputusan, Undang-Undang, Peraturan-Peraturan dan bentuk tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengawasan dan penelitian secara langsung terhadap penerimaan dan pengeluaran dalam pengelolaan keuangan Dinas Pendapatan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pangkalpinang.

Dengan cara penelitian lapangan maka data dikumpulkan melalui dua cara yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data untuk tujuan-tujuan tertentu. Untuk memperoleh data primer ini peneliti memperoleh data dengan cara :

1. Wawancara Langsung

Peneliti mengadakan wawancara langsung dengan pihak dinas yang menjadi objek penelitian untuk menggali lebih dalam data-data sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Pengamatan atau observasi langsung

Peneliti melakukan penenelitian dengan cara pengamatan dan observasi langsung sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dengan cara melihat :

1. Dokumen yaitu data yang diperoleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan dengan melihat dokumen-dokumen pada Dinas Pendapatan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kota Pangkalpinang yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Literatur-literatur yaitu buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

E. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan peneliti yaitu menggunakan teknik pengelolaan data dengan metode deskriptif kuantitatif lalu diolah lebih lanjut sehingga tersaring menjadi bahan yang berguna dalam penyusunan penelitian ini. Metode penelitian dengan cara mendeskripsikan/menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi lalu diolah dari data/angka yang diperoleh untuk mendapatkan jawaban.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Penerimaan/pendapatan

Analisis penerimaan/pendapatan antara lain analisis varians (selisih) anggaran pendapatan, analisis pertumbuhan pendapatan, rasio efektivitas

1.1 Analisis Varians (Selisih)

Analisis dihitung dengan cara menghitung selisih realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan.

Indikator apabila realisasi pendapatan diatas jumlah yang dianggarkan maka dinilai baik namun apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan maka dinilai tidak baik. (Mahmudi,2016)

1.2 Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif.

$$\text{Pertumbuhan pendapatan th t} = \frac{\text{Pendapatan Th t} - \text{Pendapatan Th(t-1)}}{\text{Pendapatan Th(t-1)}} \times 100\%$$

Indikator apabila pertumbuhan pendapatan positif maka adanya peningkatan kinerja namun apabila pertumbuhan pendapatan negatif maka adanya penurunan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah (Mahmudi,2016)

1.3 Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan).

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Darah}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk mengukur efektivitas Mahmudi (2016) dapat dikategorikan yaitu:

1. Tingkat Pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif
2. Tingkat Pencapaian 100% berarti efektif
3. Tingkat Pencapaian 90%-99% berarti cukup efektif
4. Tingkat Pencapaian 75%-89% berarti kurang efektif
5. Tingkat Pencapaian kurang 75% berarti tidak efektif

2. Analisis Pengeluaran

Analisis Pengeluaran/belanja yang terdiri dari analisis varians belanja, rasio efisiensi belanja

2.1 Analisis Varians Belanja

Analisis Varians Belanja merupakan selisih antara realisasi belanja dengan anggaran.

Indikator apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang diaanggarkan maka kinerja pemerintah daerahnya baik namun apabila realisasi belanja melebihi dari yang diaanggarkan maka kinerja pemerintah daerahnya tidak baik. (Mahmudi,2016)

2.2. Rasio Efesiensi Belanja

Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

$$\text{Rasio efisiensi belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Indikator apabila rasio efisiensi kurang dari 100% maka pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran belanja atau telah melakukan efisiensi

belanja namun apabila rasio efisiensi 100% maka pemerintah daerah dinilai telah melakukan pemborosan anggaran belanja. (Mahmudi,2016)



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum DPPKAD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan diatur Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009, Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan eselon II/b, yang dibantu oleh seorang Sekretaris dengan eselon III/a dan lima Bidang yang masing-masing dengan eselon III/b tersebut yaitu:

- Bidang Anggaran
- Bidang Perbendaharaan
- Bidang Pendapatan
- Bidang Akuntansi dan Pelaporan
- Bidang Pengelolaan Aset.

1.1. Visi, Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1.1.1 Visi

Visi merupakan tujuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sedangkan Misi merupakan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah

“ MENJADI PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG PROFESIONAL”

Setiap Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan kredibilitasnya diakui masyarakat didaerahnya sendiri maupun masyarakat luar sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, transparan, dan partisipasi. Pemerintah Kota Pangkalpinang harus dapat mengelola sumber-sumber daya masyarakat yang dipercayakan kepadanya sesuai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pangkalpinang yang melaksanakan wewenang untuk mengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah harus profesional mengelola segala penerimaan dengan efisiensi, akuntabel dan transparan agar dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

1.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi maka ditetapkan misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pendapatan Daerah (PAD) dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- b. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dalam rangka mewujudkan penganggaran yang efisien dan efektif.
- c. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
- d. Meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan daerah
- e. Meningkatkan koordinasi pembinaan laporan kepada satuan kerja perangkat daerah antar satuan kerja perangkat daerah kaitannya dalam hal pengelolaan keuangan daerah
- f. Meningkatkan kualitas sumber daya aparat.
- g. Meningkatkan pengelolaan aset daerah.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta menyelenggarakan fungsi:

- 1. Perumusan kebijakan teknis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 2. Penyelengaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah meliputi pendapatan, anggaran, perpendaharaan, akuntansi, pelaporan dan pengelolaan aset
- 4. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi
- 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Struktur Organisasi

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pangkalpinang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Pangkalpinang. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan penggabungan dari Dinas Pendapatan dengan Bagian Keuangan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

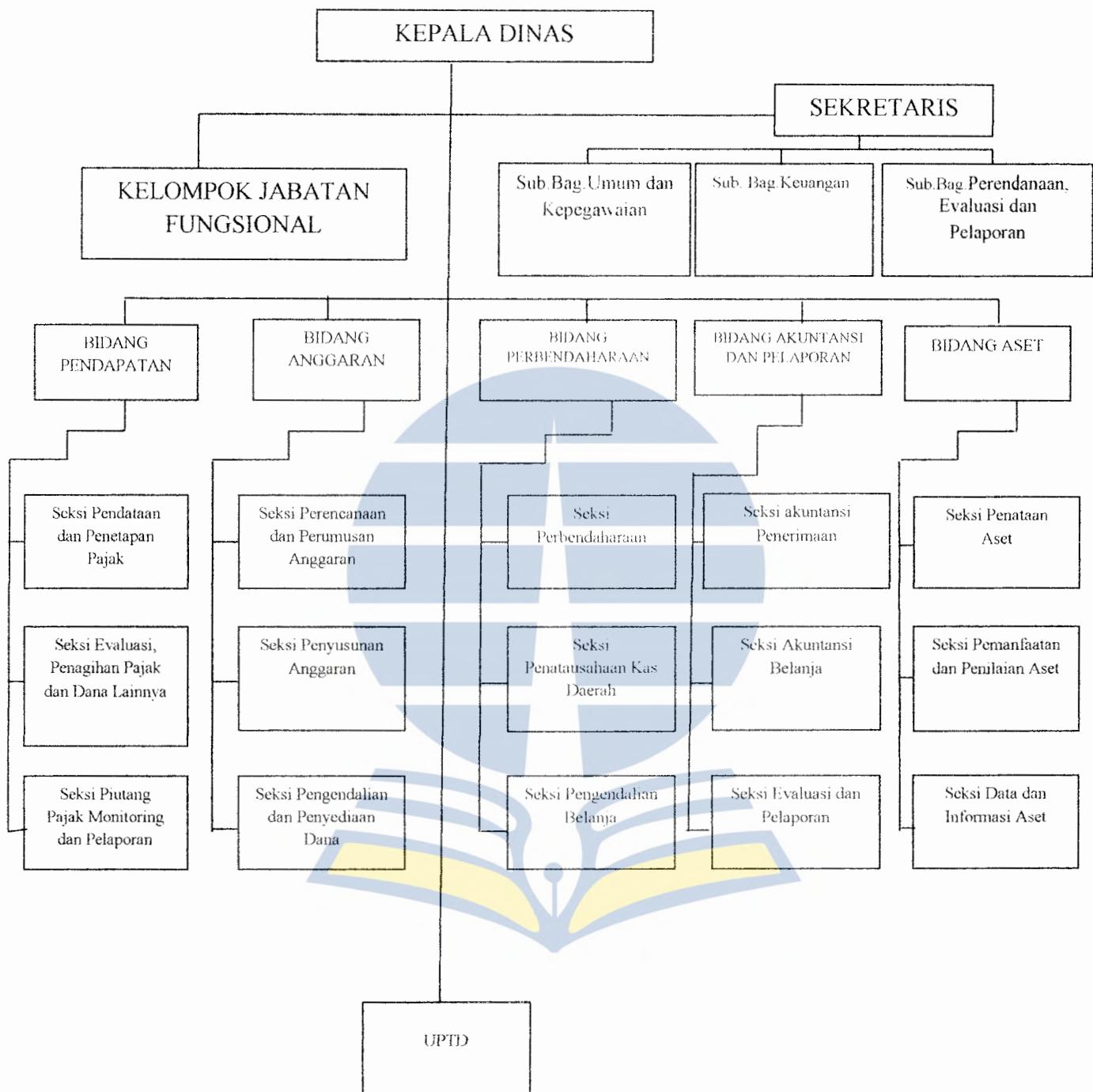
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Pangkalpinang, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Pendapatan, membawahi:
 - a. Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak
 - b. Seksi Evaluasi, Penagihan Pajak dan Dana Lainnya
 - c. Seksi Piutang Pajak Monitoring dan Pelaporan.
4. Bidang Anggaran, membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan dan Perumusan Anggaran
 - b. Seksi Penyusunan Anggaran
 - c. Seksi Pengendalian dan Penyediaan Dana

5. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 - a. Seksi Perbendaharaan
 - b. Seksi Penatausahaan Kas Daerah
 - c. Seksi Pengendalian Belanja
6. Bidang Peangelolaan Aset, membawahi:
 - a. Seksi Penatausahaan Aset
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Penilaian Aset
 - c. Seksi Data dan Informasi Aset
7. Bidang Akuntasi dan Pelaporan, membawahi :
 - a. Seksi Akuntansi Penerimaan
 - b. Seksi Akuntansi Belanja
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas
9. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Sumber:DPPKAD Kota Pangkalpinang Tahun 2017

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

1.3.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis lingkup Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan lingkup Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah
- d. Pemberdayaan semua potensi, sumber daya dan mitra dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

1.3.2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPT secara terpadu dan tugas pelayanan administratif lingkup Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan kesekretariatan
- b. Pelaksanaan pelayanan administratif kesekretariatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yang meliputi: administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program
- c. Pengkoordinasian, pengsinkronisasian dan pengendalian penyelenggaraan kebijakan tugas-tugas Bidang dan UPT
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah serta memberikan saran dan pertimbangan tentang pelaksanaan urusan pemerintah dibidang pendidikan
- e. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah.

1.3.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan aset Daerah. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- b. Pelaksanaan, pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumah tanggaan dinas, dan pengelolaan perlengkapan dinas
- c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai)
- d. Pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/ kekayaan daerah lingkup dinas pendapatan,Pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- e. Pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi dinas pendapatan,pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian

1.3.4. Sub. Bagian Keuangan

Sub.Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kesekretariat lingkup keuangan. Sub. Bagian keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuangan Dinas Pendapatan,Pengelolaan Peuangan dan Aset Daerah
- b. Pelaksanaan pengelolaan adminitrasni keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi akuntansi, monitoring evaluasi anggaran,dan pelaporan keuangan dinas
- c. Pelaporan pelaksanaan administrasi keuangan Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

1.3.5. Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Sub.Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian sekretaris lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan Dinas (Renstra,Renja,dan Penetapan Kinerja)
- b. Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas (laporan berkala kinerja)
- c. Penyusunan bahan penataan kelembagaan,ketatalaksanaan dan analisa jabatan
- d. Penyusunaan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendapatan,pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (LAKIP, memori jabatan dan LPPD)

1.3.6. Bidang Pendapatan

Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah lingkup Pendapatan.

Kepala bidang pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Pendapatan
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pendapatan
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendapatan lingkup pendapatan dan penetapan pajak, Evaluasi, Penagihan, Pajak dan Dana lainnya, piutang pajak, monitoring dan pelaporan
- d. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Pendapatan
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pendapatan

- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup pendapatan.

1.3.7. Seksi Pendataan dan Penetapan

Kepala Pendataan dan Penetapan Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendapatan lingkup Pendataan dan Penetapan Pajak.

Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data lingkup Pendataan dan Penetapan Pajak
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pendataan dan Penetapan Pajak yang meliputi pendataan wajib pajak daerah penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah pencatatan data obyek dan subyek pajak daerah pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan lapangan obyek dan subyek pajak daerah pelaksanaan perhitungan penetapan pajak pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak penerbitan, pendistribusian dan penyimpanan arsip surat pajak yang berkaitan dengan penetapan pajak pemberian kartu pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah penetapan secara jabatan tambahan pajak pelaksanaan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP), surat perjanjian angsuran dan surat keterangan pajak lainnya pengumpulan data sumber-sumber penerimaan lain diluar pajak daerah
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pendataan dan Penetapan Pajak.

1.3.8. Seksi Penagihan dan Evaluasi

Kepala Seksi dan Evaluasi, Penagihan Pajak dan Dana lainnya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendapatan lingkup Evaluasi, Penagihan Pajak dan Dana lainnya.

Kepala Seksi Evaluasi, Penagihan Pajak dan Dana lainnya mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data lingkup Evaluasi, Penagihan Pajak dan Dana lainnya
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Evaluasi, Penagihan Pajak dan Dana lainnya yang meliputi pelaksanaan kegiatan penagihan, angsuran dan keberatan penagihan pajak pelayanan surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan pajak daerah penyiapan keputusan menerima/menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan pelaksanaan penerimaan dan pencatatan semua SKP penerimaan dan pencatatan surat ketetapan pajak lainnya yang telah dibayar lunas pembinaan dan pengawasan pajak daerah skala kota evaluasi penerimaan Pendapatan Asli daerah
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Evaluasi, Penagihan Pajak dan dana lainnya

1.3.9. Seksi Piutang Pajak dan Monitoring Pajak

Kepala Seksi Piutang Pajak, Monitoring dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendapatan lingkup Piutang pajak, Monitoring dan Pelaporan.

Kepala Seksi Piutang pajak, Monitoring dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data lingkup Piutang Pajak, Monitoring dan Pelaporan

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Piutang Pajak, Monitoring dan Pelaporan yang meliputi pelaporan piutang pajak daerah dan monitoring pelunasan tunggakan pajak daerah
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Piutang Pajak, Monitoring dan Pelaporan.

1.3.10. Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas, Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah lingkup Penganggaran.

Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup penganggaran
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup Penganggaran
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Penganggaran lingkup Perencanaan dan Perumusan Anggaran penyusunan Anggaran dan Pengendalian dan Penyediaan Dana
- d. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Penganggaran
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Penganggaran
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup penganggaran.

1.3.11. Seksi Perencanaan dan Perumusan Anggaran

Kepala Seksi Perencanaan dan Perumusan Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran lingkup Perencanaan dan Perumusan Anggaran.

Kepala Seksi Perencanaan dan Perumusan Anggaran mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan data lingkup Perencanaan dan Perumusan Anggaran
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Perencanaan dan Perumusan Anggaran yang meliputi penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kota perumusan peraturan di bidang penganggaran yang menyangkut belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja bagi hasil dan belanja tidak terduga penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU kota, BUMD dan lembaga keuangan mikro kota serta investasi daerah pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU kota usulan program dan kegiatan kota untuk didanai dari DAK pelaksanaan penerapan sistem informasi penganggaran
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Perencanaan dan Perumusan Anggaran.

1.3.12. Seksi Penyusunan Anggaran

Kepala Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Anggaran lingkup Penyusunan Anggaran.

Kepala Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data lingkup Penyusunan Anggaran
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Penyusunan Anggaran yang meliputi penghimpunan dan pengkoordinasian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari SKPD penetapan peraturan daerah tentang RAPBD dan RAPBD Perubahan penyusunan nota keuangan RAPBD dan RAPBD Perubahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perubahannya penyusunan rancangan Peraturan Walikota

tentang penjabaran APBD dan APBD Perubahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan perubahannya serta Anggaran Kas SKPD dan perubahannya pengawasan atas pinjaman dan obligasi daerah serta BLU kota BUMD dan lembaga keuangan mikro, serta investasi kota fasilitasi persetujuan kontrak jangka panjang (multiyears) SKPD pengembangan model perencanaan APBD

c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Penyusunan Anggaran.

1.3.13. Seksi Pengendalian Dana

Kepala Seksi Pengendalian dan Penyediaan Dana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Anggaran lingkup Pengendalian dan Penyediaan Dana.

Kepala Seksi Pengendalian dan Penyediaan Dana mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data lingkup Pengendalian dan Penyediaan Dana
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pengendalian dan Penyediaan Dana yang meliputi pengendalian dan pengaturan likuiditas dan solvalibilitas keuangan daerah pengendalian dan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) atas belanja pegawai pada belanja tidak langsung SKPD pengendalian dan penerbitan SPD atas belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja tidak terduga SKPD pengendalian dan penerbitan SPD atas program dan kegiatan pada belanja langsung SKPD pengendalian dan penerbitan SPD atas pengeluaran pembiayaan SKPD pengelolaan register SPD SKPD penyusunan laporan realisasi sumber penerimaan daerah terhadap penetapan anggaran kas pendapatan daerah pelaksanaan pengelolan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU kota pengelolaan

Dana Alokasi Umum (DAU) kota pelaporan pengelolaan DAU kota pengelolaan
Dana Alokasi Khusus (DAK) kota pengendalian dana pelaporan pengelolaan DAK
kota penyiapan data realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) kota
pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH kota

- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengendalian dan Penyediaan Dana.

1.3.14. Bidang Perbendaraan

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah lingkup Perbendaharaan.

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Perbendaharaan
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup Perbendaharaan
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup perbendaharaan lingkup perbendaharaan, Penatausahaan Kas Daerah, dan Pengendalian Belanja
- d. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Perbendaharaan
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Perbendaharaan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Perbendaharaan.

1.3.15. Seksi Perbendaraan

Kepala Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan lingkup Perbendaharaan.

Kepala Seksi Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data lingkup Perbendaharaan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Perbendaharaan yang meliputi penetapan Pengguna Anggaran (PA), kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan,
- c. Bendahara Penerimaan Pembantu menerbitkan SP2D berdasarkan SPM membuat register SP2D dan register SP2D per SKPD membuat Surat Keterangan Pensiun Pegawai
- d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Perbendaharaan.

1.3.16. Seksi Penatausahaan Kas

Kepala Seksi Penatausahaan Kas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan lingkup Penatausahaan Kas Daerah.

Kepala Seksi Penatausahaan Kas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data lingkup Penatausahaan Kas Daerah
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Penatausahaan Kas Daerah yang meliputi penyelenggaraan laporan dan evaluasi keuangan kas daerah penyiapan Buku Kas Umum Daerah rekonsiliasi bank untuk membandingkan saldo kas di bank menurut rekening koran dengan saldo kas di bank menurut laporan posisi kas
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Penatausahaan Kas Daerah.

1.3.17. Seksi Pengendalian Belanja

Kepala Seksi Pengendalian Belanja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan lingkup Pengendalian Belanja.

Kepala Seksi Pengendalian Belanja mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data lingkup Pengendalian Belanja
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pengendalian Belanja yang meliputi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pengeluaran APBD, DAU, DAK, Bantuan, Dana Perimbangan oleh Bank/Lembaga keuangan lainnya
- c. Pelaksanaan penelitian atas penyimpanan uang daerah sebagai fungsi kas daerah pemeriksaan dan pengujian substantive dan formal terhadap SPM yang diajukan pengendalian belanja terhadap pengajuan SPP dan SPM
- d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengendalian Belanja.

1.3.18. Bidang Pengelolaan Aset

Kepala Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah lingkup Pengelolaan aset.

Kepala Bidang Pengelolaan Aset mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Pengelolaan Aset
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pengelolaan Aset
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Aset lingkup Penatausahaan Aset, Pemanfaatan dan Penilaian Aset, Data dan Informasi Aset meliputi perumusan bahan penetapan kebijakan pengelolaan aset kota, pelaksanaan pengelolaan aset kota, pengawasan pengelolaan aset kota, fasilitasi pengelolaan aset kota, pengawasan pengelolaan aset kota, fasilitasi pengelolaan aset pemekaran skala kota
- d. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup pengelolaan Aset

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pengelolaan Aset
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan aset Daerah serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Pengelolaan Aset.

1.3.19. Seksi Penatausahaan Aset

Kepala Seksi Penatausahaan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Aset lingkup Penatausahaan aset.

Kepala Seksi Penatausahaan Aset mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data lingkup Penatausahaan Aset.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penatausahaan Aset lingkup pembukaan meliputi merekapitulasi Daftar Barang Pengguna (DBP)/ Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) SKPD menurut penggolongan dan kodefikasi barang merekapitulasi inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah setiap SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengacu kepada SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) menyusun Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/ atau bangunan milik pemerintah daerah lingkup pencatatan meliputi merekapitulasi pencatatan barang milik daerah dalam Kartu Inventaris Ruangan (KIR) Kartu Inventaris Barang (KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E, dan, KIB F) setiap SKPD merekapitulasi dan menyusun Daftar barang milik Daerah (DPMD) menyimpan seluruh bentuk dokumen perjanjian sewa-menyeWA, berita acara pinjam pakai/ serah terima barang (tanah/bangunan/kendaraan Dinas), Kerja sama pemanfaatan, bangunan guna serah (BGS), Bangunan serah guna (BSG) serta dokumen penjualan, tukar-menukar (ruilslag), hibah barang milik daerah dan penyertaan modal pemerintah

kota Pangkalpinang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, surat-surat hibah dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (STNK/ BPKB), sertifikat tanah dan/ atau bukti-bukti kepemilikan aset tanah dalam bentuk hak pakai, hak pengelolaan, hak usaha atas tanah atau keterangan-keterangan lain yang membuktikan atau membenarkan bahwa aset tanah tersebut adalah milik/ dikuasai oleh pemerintah daerah lingkup pelaporan melaksanakan Inventarisasi Barang Milik daerah setiao 1 (satu) tahun sekali melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII), beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah menghimpun laporan barang semesteran dan tahunan menjadi laporan Barang Milik Daerah (LBMD), melakukan verifikasi daftar barang milik daerah (DBMD) dan berkoordinasi dengan seksi data dan informasi dalam upaya pengaplikasian Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)

- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Penatausahaan Aset

1.3.20. Seksi Pemanfaatan dan Penilaian Aset

Kepala Seksi Pemanfaatan dan Penilaian Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Aset lingkup Pemanfaatan dan Penilaian Aset.

Kepala Seksi Pemanfaatan dan Penilaian Aset mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data lingkup Pemanfaatan dan Penilaian Aset
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pemanfaatan dan Penilaian Aset yang meliputi penyusunan bahan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Negara/ Daerah dan kepentingan umum untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang dipergunakan dan atau tidak

dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dengan persetujuan Kepala Daerah meliputi sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah dan bangun serah guna untuk aset tanah dan/atau bangunan yang berada diluar penguasaan SKPD yang bersangkutan merekapitulasi seluruh bentuk dokumen perjanjian sewa-menyewa, berita acara pinjam pakai/ serah terima barang (tanah/bangunan/kendaraan dinas) kerjasama pemanfaatan bangunan guna serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG) serta dokumen penjualan, tukar menukar (ruislag), hibah barang milik daerah dan penyertaan modal Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku, surat-surat hibah, dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (STNK/BPKB), sertifikat tanah dan/ atau bukti-bukti kepemilikan aset tanah dalam bentuk hak pakai, hak pengelolaan, hak usaha atas tanah atau keterangan-keterangan lain yang membuktikan atau membenarkan bahwa aset tanah tersebut adalah milik/dikuasai oleh pemerintah daerah yang merupakan bentuk upaya pengamanan aset/barang milik daerah, melakukan pengamanan barang milik daerah meliputi pengamanan administrasi yaitu kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan, pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang, pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan, pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan, membuat sertifikat tanah atas nama Pemerintah Kota atas tanah yang dikuasai, untuk barang selain tanah membuat bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Kota menyusun Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik

Daerah (DKPBMD) melakukan penilaian barang milik daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Penghapusan barang milik daerah dengan Keputusan Kepala Daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna dengan melibatkan SKPD/unsur terkait. Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan atas barang milik daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindah tangankan, penghapusan Barang milik daerah yang masih mempunyai nilai ekonomis melalui pelelangan umum/pelelangan terbatas, disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain, Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas disetor ke kas Daerah melaksanakan kegiatan pemindahtanganan barang milik daerah (penjualan tukar menukar, hibah, penyertaan modal), khususnya aset-aset yang berada di luar SKPD yang bersangkutan, menyusun draft surat keputusan kepala daerah berkaitan dengan status penggunaan barang inventaris milik daerah pada seluruh SKPD pemindahtanganan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku meliputi penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah daerah

- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pemanfaatan dan Penilaian Aset.

1.3.21. Seksi Data dan Informasi Aset

Kepala Seksi Data dan Informasi Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Aset lingkup Data dan Informasi Aset.

Kepala Seksi Data dan Informasi Aset mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data lingkup Data dan Informasi Aset.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Data dan Informasi aset yang meliputi penelusuran bukti-bukti kepemilikan aset milik/ dikuasai pemerintah

daerah pemutakhiran data barang investaris yang terekap dalam daftar barang milik daerah (DBMD), menyiapkan informasi daftar kekayaan daerah dalam bentuk pemanfaatan dan nilai (angka) monitoring aset (check on spot) berdasarkan data dan informasi yang ada diseluruh SKPD /satker dan mengupayakan penyiapan data dan informasi barang milik daerah se-valid dan se-up to date mungkin dalam rangka persiapan pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA), penyiapan data dan informasi aset untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah daerah

- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Data dan Informasi Aset.

1.3.22. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah lingkup Akuntansi dan pelaporan.

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Akuntansi dan Pelaporan
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup Akuntansi dan Pelaporan
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Akuntansi dan Pelaporan lingkup Akuntansi Penerimaan, Akuntansi Belanja, Evaluasi dan Pelaporan
- d. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Akuntansi dan Pelaporan
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Akuntansi dan Pelaporan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Akuntansi dan Pelaporan

1.3.23. Seksi Akuntansi Penerimaan

Kepala Seksi Akuntansi Penerimaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan lingkup Akuntansi dan Pelaporan lingkup Akuntansi Penerimaan.

Kepala Seksi Akuntansi Penerimaan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data lingkup Akuntansi Penerimaan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Akuntansi Penerimaan yang meliputi pencatatan/ pembukuan ketetapan, target dan realisasi pendapatan daerah penelitian terhadap bukti kas/ bank mengenai penerimaan daerah pencatatan/ pembukuan penerimaan benda berharga
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Akuntansi Penerimaan.

1.3.24. Seksi Akuntansi Belanja

Kepala Seksi Akuntansi Belanja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan lingkup Akuntansi Belanja.

Kepala Seksi Akuntansi Belanja mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data lingkup Akuntansi Belanja
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Akuntansi Belanja yang meliputi penelitian dan pemeriksaan realisasi belanja daerah penelitian terhadap bukti kas/ bank mengenai belanja daerah penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Akhir Kas
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Akuntansi Belanja.

1.3.25. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan lingkup Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Seksi Evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data lingkup Evaluasi dan Pelaporan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Evaluasi dan Pelaporan yang meliputi pelaporan target dan realisasi APBD mempersiapkan vahan rapat, seminar, lokakarya dibidang pendapatan dan belanja daerah menyusun laporan pelaksanaan anggaran secara berkala, yakni triwulan, semester dan tahunan penyusunan Neraca Daerah
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Seksi Evaluasi dan pelaporan

B. Hasil

Hasil yang diperoleh dalam penelitian yaitu Pemerintahan Kota Pangkalpinang merupakan organisasi non profit yang memiliki tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai bidang. Pelaksanaan Pemerintah Kota Pangkalpinang dipimpin oleh Walikota selaku Bendahara Umum Daerah yang mendelegasikan tugasnya melalui pejabat di lingkungan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Pemerintah Kota Pangkalpinang memiliki 34 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan yang ditampilkan pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

SKPD DAN BENDAHARA DI PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

NO	SKPD	BENDAHARA
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengeluaran
2	Badan Kepegawaian Daerah	Pengeluaran
3	Badan Lingkungan Hidup	Pengeluaran
4	Dinas Pendidikan	Pengeluaran
5	Dinas Kesehatan	Pengeluaran/Penerimaan
6	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	Pengeluaran/Penerimaan
7	Dinas Kebudayaan,Pariwisata,Pemuda dan Olahraga	Pengeluaran/Penerimaan
8	Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika	Pengeluaran/Penerimaan
9	Dinas Pertanian	Pengeluaran/Penerimaan
10	Dinas Kebersihan dan Kebakaran	Pengeluaran/Penerimaan
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengeluaran/Penerimaan
12	Dinas Pendapatan,Pengelolaan,Keuangan dan Aset Daerah	Pengeluaran/Penerimaan
13	Dinas Pekerjaan Umum	Pengeluaran
14	Dinas Tata Kota	Pengeluaran
15	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Pengeluaran
16	Kecamatan Gerunggang	Pengeluaran
17	Inspektorat	Pengeluaran
18	Kepala Daerah – Wakil Kepala Daerah	Pengeluaran
19	Kecamatan Bukit Intan	Pengeluaran
20	Kecamatan Gabek	Pengeluaran
21	Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengeluaran
22	Ketahanan Pangan	Pengeluaran
23	Kantor Perpustakaan dan Arsip	Pengeluaran
24	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	Pengeluaran/Penerimaan
25	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi-Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Pengeluaran/Penerimaan
26	Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana	Pengeluaran
27	Kecamatan Rangkui	Pengeluaran
28	Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah	Pengeluaran
29	Satuan Polisi Pamong Praja	Pengeluaran
30	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pengeluaran
31	Sekretariat Daerah Kota	Pengeluaran
32	Kecamatan taman sari	Pengeluaran
33	Kecamatan Girimaya	Pengeluaran
34	Kecamatan Pangkalbalam	Pengeluaran

Sumber : DPPKAD Kota Pangkalpinang Tahun 2017

1. Penerimaan

Penerimaan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) atau Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) merupakan penerimaan yang secara langsung diterima pada kas umum daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang.

DPPKAD Kota Pangkalpinang selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah memiliki penerimaan yang diperoleh sebagai berikut :

1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adapun kewenangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Jenis Pajak/Retribusi Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang

No	Jenis Pajak / Retribusi	Instansi	Bidang
1	Pajak Hotel	Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah	Pendapatan
2	Pajak Restoran	Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah	Pendapatan
3	Pajak Hiburan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah	Pendapatan
4	Pajak Reklame	Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah	Pendapatan
5	Pajak Penerangan Jalan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah	Pendapatan
6	Pajak Minerba	Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah	Pendapatan
7	Pajak Parkir	Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah	Pendapatan

8	Pajak Air Tanah	Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah	Pendapatan
9	Pajak Sarang Burung Walet	Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah	Pendapatan
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah	Pendapatan
11	Pajak Bumi dan Bangunan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah	Pendapatan
12	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas
13	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Kebersihan dan Kebakaran	Bidang Kebersihan
14	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	UPT Parkir
15	Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Perindakop dan UMKM	UPT Pasar
16	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	UPT Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
17	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Dinas Kebersihan dan Kebakaran	Bidang Kebakaran
18	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Dinas Kebersihan dan Kebakaran	Pengolahan Persampahan
19	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Bidang Kominfo
20	Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah	Bidang Aset
21	Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi-Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Bidang Perindustrian & UPT Pasar
22	Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Destinasi Pariwisata
23	Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Perikanan dan Kelautan	Budi Daya
24	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi-Usaha Mikro Kecil dan Menengah	UPT Pasar
25	Retribusi Pelelangan Ikan	Dinas Perikanan dan Kelautan	Perikanan Tangkap
26	Retribusi Terminal	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	UPT Terminal & Perparkiran
27	Retribusi Tempat Khusus Parkir (RSUD)	Dinas Perhubungan,	UPT Parkir

		Komunikasi dan Informatika	
28	Retribusi Tempat Khusus Parkir (Pantai Pasir Padi)	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	UPT Parkir
29	Retribusi Tempat Khusus Parkir (TPI/PPI)	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	UPT Parkir
30	Retribusi Rumah Potong Hewan	Dinas Peternakan	Peternakan
31	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Dinas Kebudayaan,Pariwisata,Pem uda dan Olahraga	Destinasi Pariwisata
32	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	Pengolahan Data
33	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	Pengolahan Data
34	Retribusi Izin Gangguan	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	Pengolahan Data
35	Retribusi Izin Trayek	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Perhubungan Darat

Sumber : DPPKAD Kota Pangkalpinang Tahun 2017

2. Penerimaan Pendapatan transfer yang merupakan transfer Pemerintah Pusat/Dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil pajak,dana bagi hasil sumber daya alam,dana alokasi umum,dana alokasi khusus
3. Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yaitu dana penyesuaian
4. Penerimaan yang diperoleh dari transfer Pemerintah Propinsi yang terdiri dari Pendapatan bagi hasil pajak dan pendapatan bagi hasil lainnya.

2. Pengeluaran

Pengeluaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) atau Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) merupakan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan pada tingkat pemerintah daerah yang keluar dari kas umum daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Adapun pengeluaran yang keluar dari kas umum daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang yaitu :

1. Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Tanah, Peralatan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan,Irigasi, Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya , Belanja Aset lainnya
3. Belanja Tidak Terduga
4. Transfer yang merupakan akun yang digunakan untuk menampung pengeluaran uang dari Pemerintah Kota Pangkalpinang ke entitas pelaporan lain misalnya pemberian bantuan keuangan kepada partai politik.

C. Pembahasan

Adapun analisis yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Analisis Penerimaan/pendapatan

Analisis penerimaan/pendapatan antara lain analisis varians (selisih) anggaran pendapatan, analisis pertumbuhan pendapatan, rasio efektivitas.

1.1 Analisis Varians (Selisih)

Analisis varians (selisih) dihitung dengan cara menghitung selisih realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan.

Indikator apabila realisasi pendapatan diatas jumlah yang dianggarkan maka dinilai baik namun apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan maka dinilai tidak baik.(Mahmudi,2016)

1.1.1 Analisis varians pada periode 2013

Untuk melihat pengelolaan keuangan daerah dalam keadaan baik salah satunya digunakan perhitungan varians (selisih) sehingga dapat ditarik kesimpulan

bahwa pengelolaan keuangan daerahnya baik atau tidak dilihat dari sudut pandang pendapatan. Adapun analisis varians pada periode 2013 s.d 2015 dapat ditampilkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3

Analisis Varian Periode 2013

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN 2013 (Rp)	REALISASI 2013 (Rp)	ANALISIS VARIANS (Rp)	(%) Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	657.998.836.219,00	662.197.444.473,99	4.198.608.254,99	101
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	81.544.926.490,00	92.106.752.248,02	10.561.825.758,02	113
1.1.1.	Pendapatan Daerah	34.220.000.000,00	47.978.125.915,70	13.758.125.915,70	140
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	15.016.298.500,00	16.134.938.007,00	1.118.639.507,00	107
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.800.000.000,00	3.841.426.516,29	41.426.516,29	101
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	28.518.627.990,00	24.152.261.809,03	(4.366.366.180,97)	85
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	575.443.909.729,00	569.883.066.755,97	(5.560.842.973,03)	99
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	470.485.379.674,00	469.708.594.566,00	(776.785.108,00)	100
1.2.1.1.	Dana Bagi Hasil Pajak	28.067.898.592,00	28.738.981.151,00	671.082.559,00	102
1.2.1.2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	25.369.918.082,00	23.922.050.415,00	(1.447.867.667,00)	94
1.2.1.3.	Dana Alokasi Uinum	384.421.523.000,00	384.421.523.000,00	-	100
1.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus	32.626.040.000,00	32.626.040.000,00	-	100
1.2.2.	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	38.203.724.000,00	38.203.724.000,00	-	100
1.2.2.1.	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	0
1.2.2.2.	Dana Penyesuaian	38.203.724.000,00	38.203.724.000,00	-	100
1.2.2.2.	Dana Desentralisasi dan Penguatan Fiskal	-	-	-	0
1.2.3.	Transfer Pemerintah Provinsi	66.754.806.055,00	61.970.748.189,97	(4.784.057.865,03)	93
1.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	38.114.566.055,00	39.557.422.189,97	1.442.856.134,97	104
1.2.3.2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	28.640.240.000,00	22.413.325.900,00	(6.226.914.100,00)	78
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	1.000.000.000,00	207.625.470,00	(792.374.530,00)	21
1.3.1.	Pendapatan Hibah	1.000.000.000,00	207.625.470,00	(792.374.530,00)	21
1.3.2.	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	0
1.3.3.	Pendapatan Lainnya	-	-	-	0
	JUMLAH	657.998.836.219,00	662.197.444.473,99	4.198.608.254,99	1,01

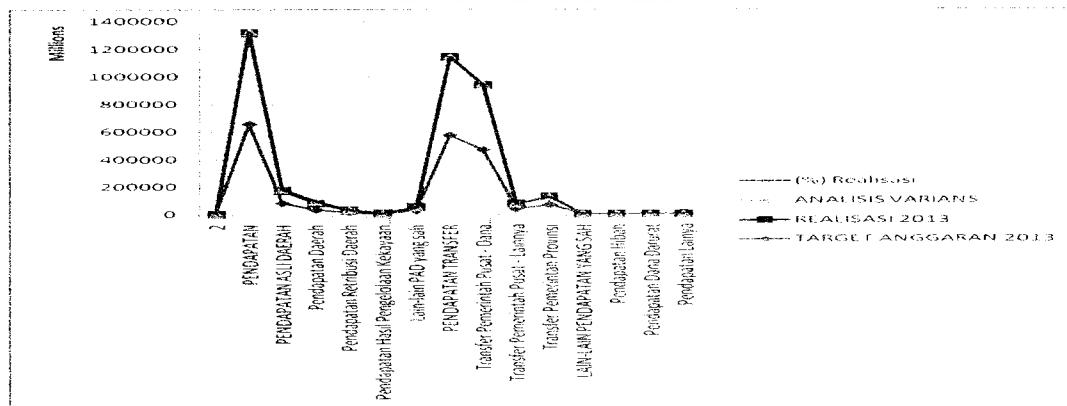
Sumber : Data Diolah Tahun 2017

Dari target anggaran penerimaan pada tahun 2013 sebesar Rp 657.998.836.219,00 (Enam ratus lima puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah) sudah terealisasi penerimaan yang diperoleh Pemerintah Kota Pangkalpinang sebesar Rp 662.197.444.473,99 (Enam ratus enam puluh dua milyar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah sembilan puluh) dengan varians lebih/selisih yang diharapkan (*favourable variance*) artinya selisih lebih besar pada realisasi pendapatan sebesar Rp 4.198.608.254,99 (Empat milyar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah sembilan puluh sembilan sen) dengan presentasi sebesar 1,01 % secara keseluruhan penerimaan Pemerintah Kota Pangkalpinang dikatakan **baik** karena realisasi penerimaan diatas target anggaran sebesar Rp 657.998.836.219,00 (Enam ratus lima puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah).

Penerimaan digambarkan dalam bentuk grafik seperti dibawah ini:

Grafik 4.1

Analisis Varians Penerimaan Periode 2013



1.1.2 Analisis varians pada periode 2014

Tabel 4.4

Analisis Varian Periode 2014

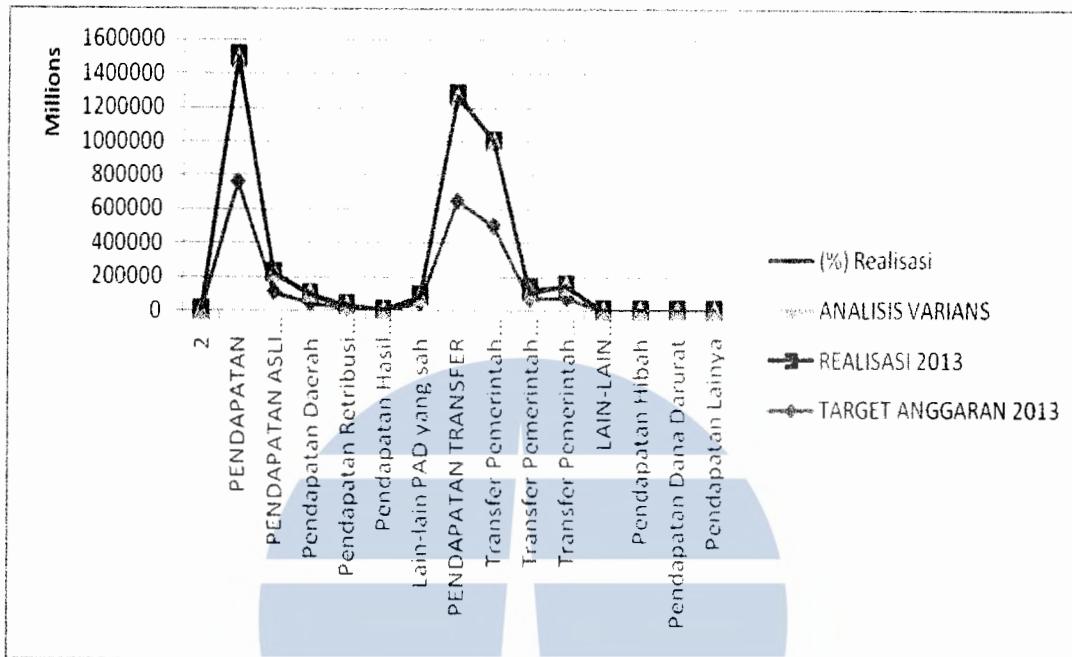
NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN 2014 (Rp)	REALISASI 2014 (Rp)	ANALISIS VARIANS (Rp)	(%) Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	763.679.230.449,51	745.888.134.815,09	(17.791.095.634,42)	98
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	111.294.287.826,51	113.817.278.385,97	2.522.990.559,46	102
1.1.1.	Pendapatan Daerah	45.175.000.000,00	52.847.336.511,80	7.672.336.511,80	117
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	15.194.021.000,00	16.455.668.909,66	1.261.647.909,66	108
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.000.000.000,00	2.039.642.020,30	(1.960.357.979,70)	51
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	46.925.266.826,51	42.474.630.944,21	(4.450.635.882,30)	91
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	652.384.942.623,00	632.070.856.429,12	(20.314.086.193,88)	97
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	504.369.613.623,00	501.293.469.097,00	(3.076.144.526,00)	99
1.2.1.1.	Dana Bagi Hasil Pajak	24.637.442.540,00	21.845.752.927,00	(2.791.689.613,00)	89
1.2.1.2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	24.177.648.083,00	34.110.343.170,00	9.932.695.087,00	141
1.2.1.3.	Dana Alokasi Umum	414.685.923.000,00	414.685.923.000,00	-	100
1.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus	40.868.600.000,00	30.651.450.000,00	(10.217.150.000,00)	75
1.2.2.	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	73.142.789.000,00	55.096.212.000,00	(18.046.577.000,00)	75
1.2.2.1.	Dana Penyesuaian	73.142.789.000,00	55.096.212.000,00	(18.046.577.000,00)	75
1.2.3.	Transfer Pemerintah Provinsi	74.872.540.000,00	75.681.175.332,12	808.635.332,12	101
1.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	36.000.000.000,00	45.769.318.082,12	9.769.318.082,12	127
1.2.3.2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	38.872.540.000,00	29.911.857.250,00	(8.960.682.750,00)	77
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	-
1.3.1.	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
1.3.2.	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3.	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
JUMLAH		763.679.230.449,51	745.888.134.815,09	(17.791.095.634,42)	98

Sumber : Data Diolah Tahun 2017

Penerimaan digambarkan dalam bentuk grafik seperti dibawah ini:

Grafik 4.2

Analisis Varians Penerimaan Periode 2014



Dari target anggaran penerimaan pada tahun 2014 sebesar Rp 763.679.230.449,51 (Tujuh ratus enam puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah lima puluh satu sen) sudah terealisasi penerimaan yang diperoleh Pemerintah Kota Pangkalpinang sebesar Rp 745.888.134.815,09 (Tujuh ratus empat puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh delapan rupiah seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah sembilan sen) dengan varians kurang/selisih yang tidak diharapkan (*unfavourable variance*) sebesar (Rp 17.791.095.634,42) (Tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah empat puluh dua sen) dengan presentasi sebesar 0,98 % secara keseluruhan penerimaan Pemerintah

Kota Pangkalpinang dikatakan **belum baik** karena realisasi penerimaan masih dibawah target anggaran sebesar Rp 763.679.230.449,51 (Tujuh ratus enam puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah lima puluh satu sen).

1.1.3 Analisis varians pada periode 2015

Tabel 4.5

Analisis Varian Periode 2015

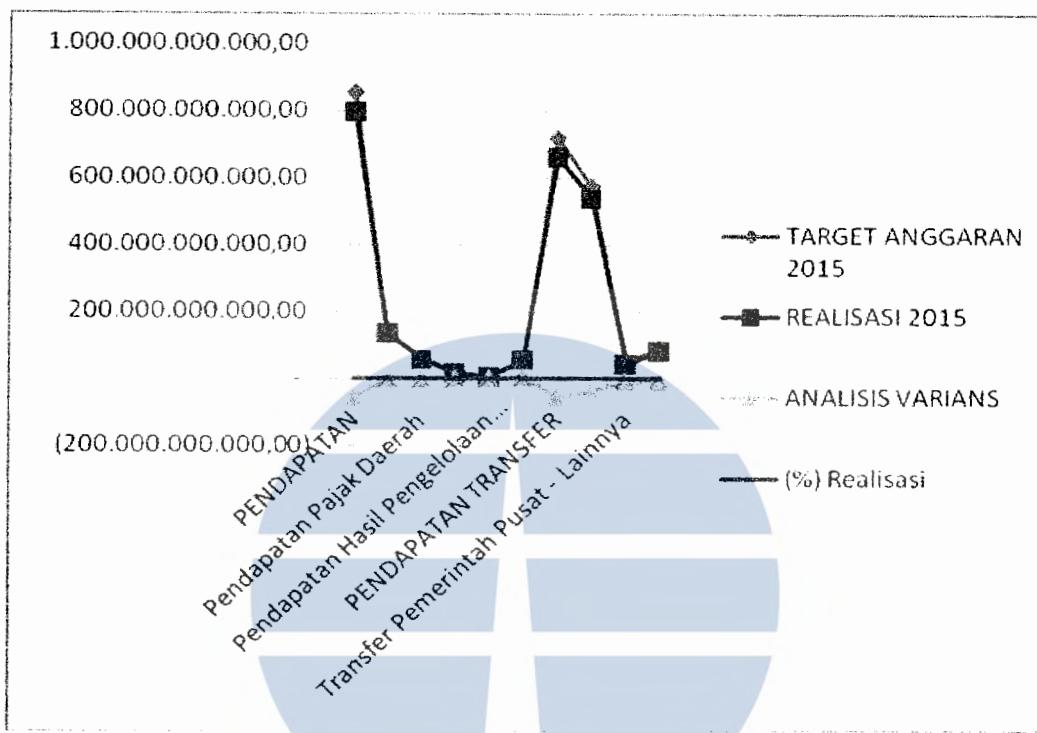
No.	URAIAN	TARGET ANGGARAN 2015 (Rp)	REALISASI 2015 (Rp)	ANALISIS VARIANS (Rp)	(%) Realisasi
1	PENDAPATAN	853.965.575.459,70	797.819.738.788,28	(56.145.836.671,42)	93
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	135.492.246.486,70	135.305.782.559,87	(186.463.926,83)	100
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	60.600.000.000,00	57.078.721.262,23	(3.521.278.737,77)	94
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	17.712.600.000,00	16.933.544.415,66	(779.055.584,34)	96
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.200.000.000,00	4.314.667.852,53	114.667.852,53	103
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	52.979.646.486,70	56.978.849.029,45	3.999.202.542,75	108
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	718.473.328.973,00	662.513.956.228,41	(55.959.372.744,59)	92
1.2.1.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	574.789.879.854,00	538.208.270.454,00	(36.581.609.400,00)	94
1.2.1.1.	Dana Bagi Hasil Pajak	24.882.993.000,00	17.579.718.100,00	(7.303.274.900,00)	71
1.2.1.2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	51.496.067.854,00	37.927.273.354,00	(13.568.794.500,00)	74
1.2.1.3.	Dana Alokasi Unum	419.863.119.000,00	419.863.119.000,00	-	100
1.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus	78.547.700.000,00	62.838.160.000,00	(15.709.540.000,00)	80
1.2.2.	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	54.097.479.000,00	43.423.684.000,00	(10.673.795.000,00)	80
1.2.2.1.	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	0
1.2.2.2.	Dana Penyesuaian	54.097.479.000,00	43.423.684.000,00	(10.673.795.000,00)	80
1.2.3.	Transfer Pemerintah Provinsi	89.585.970.119,00	80.882.001.774,41	(8.703.968.344,59)	90
1.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	48.397.950.119,00	63.365.681.774,41	14.967.731.655,41	131
1.2.3.2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	41.188.020.000,00	17.516.320.000,00	(23.671.700.000,00)	43
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	0
1.3.1.	Pendapatan Hibah	-	-	-	0
1.3.2.	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	0
1.3.3.	Pendapatan Lainnya	-	-	-	0
	Jumlah	853.965.575.459,70	797.819.738.788,28	(56.145.836.671,42)	93

Sumber : Data Diolah Tahun 2017

Penerimaan digambarkan dalam bentuk grafik seperti dibawah ini:

Grafik 4.3

Analisis Varians Penerimaan Periode 2015



Dari target anggaran penerimaan pada tahun 2015 sebesar Rp 853.965.575.459,70 (delapan ratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen) sudah terealisasi penerimaan yang diperoleh Pemerintah Kota Pangkalpinang sebesar Rp 797.819.738.788,28 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh delapan sen) dengan varians/selisih yang tidak diharapkan (*unfavourable variance*) sebesar Rp (56.145.836.671,42) (lima puluh enam miliar seratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah empat

puluhan dua sen) dengan presentasi sebesar 0,93 % secara keseluruhan penerimaan Pemerintah Kota Pangkalpinang dikatakan belum baik karena realisasi penerimaan masih dibawah target anggaran sebesar Rp 853.965.575.459,70 (Lima puluh enam miliar seratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah empat puluh dua sen)

Adanya realisasi penerimaan dibawah target penerimaan hal ini dikarenakan antara lain:

1. Kesadaran para Wajib Pajak akan kewajibannya sangatlah kurang sehingga para Wajib Pajak enggan menyampaikan laporan tentang jumlah tamu yang menginap dengan benar.
2. Pertumbuhan usaha Hotel/Penginapan di Kota Pangkalpinang sangat lambat, sedangkan untuk rumah kos / rumah kontrakan banyak masyarakat yang belum mempunyai kesadaran dan keberatan atas pengenaan pajak rumah kos / rumah kontrakan.
3. Para Pengusaha Restoran/Rumah Makan merasa pembayaran pajak Restoran/ Rumah Makan akan mengurangi keuntungannya, sehingga mereka enggan menyampaikan laporan jumlah omzet yang mereka terima kepada petugas dari DPPKAD Kota Pangkalpinang.
4. Pertumbuhan usaha Hiburan di Kota Pangkalpinang sangat lambat, sehingga upaya peningkatan penerimaan PAD dari Pajak Hiburan ini sangatlah terbatas.
5. Pemungutan Pajak Reklame yang dilakukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota belum maksimal, karena untuk objek Pajak

Reklame yang baru tidak dapat dipungut sebelum ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota Kota Pangkalpinang sedangkan yang Pajak Reklame terusan / lanjutan tetap dipungut.

6. Pihak PLN belum melaksanakan kesepakatan MOU (*memorandum of understanding*) dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang dan tidak menyampaikan laporan, sehingga penyetoran pajak dilakukan secara langsung ke Kas Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
7. Belum adanya Peraturan Walikota turunan dari Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan.
8. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan boleh dibilang hampir tidak ada di Kota Pangkalpinang. Oleh sebab itu, Pangkalpinang sangat mengandalkan pemasukan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari Kegiatan pembangunan fisik bangunan atas Kegiatan Pembangunan yang didanai APBD Kota Pangkalpinang maupun APBD Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Objek Pajak Parkir di Wilayah Kota Pangkalpinang terbatas pada pengusaha yang mengelola parkir sedangkan pengusaha yang tidak mengelola parkir di tempat usaha mereka tidak dapat memungut pajaknya.
10. Karena pengelolaan pemungutan Pajak Air Tanah baru dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 sehingga banyak objek baru yang belum terdata.
11. Banyaknya Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang melakukan transaksi jual beli tidak melapor harga transaksi yang sebenarnya sehingga pajak yang diterima tidak maksimal.

12. Banyaknya Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang datanya ganda dan banyaknya alamat WP yang tidak diketahui tempat penagihannya serta WP yang berubah nama atau sudah dipindah tangan dengan pemilik baru.
13. Adanya pelayanan BPJS pada klinik-klinik swasta juga mempengaruhi pendapatan retribusi pada setiap puskesmas.
14. Masyarakat masih banyak yang belum membayar Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dengan alasan membuang sampah sendiri.
15. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kegunaan alat pemadam kebakaran dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya kebakaran.
16. Kurangnya sarana untuk penyedotan tinja dan adanya usaha penyedotan tinja milik swasta.
17. Banyaknya petugas parkir yang tidak jujur, pengaruh kondisi alam / hujan dan banyak premanisme dan parkir liar
18. Kurang adanya kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi dan kurang adanya minat para pedagang untuk berjualan di meja batu maupun lapak yang telah sediakan karena fasilitas yang ada di Pasar Pagi (Pasar Kampung Melayu) yang ada di lantai bawah rusak parah sehingga para pedagang cenderung untuk berjualan di luar lapak atau meja batu dengan demikian cenderung terkesan sebagai PASAR TUMPAH sehingga Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Unit Pelaksana Teknis Pasar susah untuk memungut atau menagih

Retribusi tersebut dan tidak ada peminat/penyewa yang mau menyewa kios-kios lantai 2 sehingga target tidak tercapai

19. Rumah Potong Hewan (RPH) Sapi, fasilitas belum lengkap, Daya tampung belum optimal dan sumber daya manusia teknis pemotongan hewan belum memadai
20. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat Surat izin Gangguan
21. Pemakai Jasa Kekayaan Daerah Tidak Memberikan Keterangan/ Data yang lengkap dalam setoran bank dan pemakai jasa tidak melaporkan kepada Bidang Aset DPPKAD setelah menyetor uang ke Bank.

1.2 **Analisis Pertumbuhan Pendapatan**

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif.

$$\text{Pertumbuhan pendapatan th t} = \frac{\text{Pendapatan Th t} - \text{Pendapatan Th(t-1)}}{\text{Pendapatan Th(t-1)}} \times 100\%$$

Indikator apabila pertumbuhan pendapatan positif maka adanya peningkatan kinerja dan apabila pertumbuhan pendapatan negatif maka adanya penurunan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah.(Mahmudi,2016)

Adapun Analisa pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kota Pangkalpinang periode 2013 sd 2015 sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Pendapatan Tahun 2013

$$\frac{662.197.444.473,99 - 586.524.654.015,98}{586.524.654.015,98} \times 100\% = 66\%$$

2. Pertumbuhan Pendapatan Tahun 2014

$$\frac{745.888.134.815,09 - 662.197.444.473,99}{662.197.444.473,99} \times 100\% = 74\%$$

3. Pertumbuhan Pendapatan Tahun 2015

$$\frac{797.819738.788,28 - 745.888.134.815,09}{745.888.134.815,09} \times 100\% = 79\%$$

Tabel 4.6

Pertumbuhan Pendapatan Periode 2013 sd 2015

No	Tahun	Uraian	%	Keterangan
1	2013	Pertumbuhan Pendapatan	66	Positif
2	2014	Pertumbuhan Pendapatan	74	Positif
3	2015	Pertumbuhan Pendapatan	79	Positif

Sumber : Data Diolah Tahun 2017

Dari tabel 4.6 diperoleh pertumbuhan pendapatan yang positif sehingga adanya peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Pangkalpinang.

1.3 Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan).

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk mengukur efektivitas Mahmudi (2016) dapat dikategorikan yaitu:

1. Tingkat Pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif
2. Tingkat Pencapaian 100% berarti efektif
3. Tingkat Pencapaian 90%-99% berarti cukup efektif

4. Tingkat Pencapaian 75%-89% berarti kurang efektif
5. Tingkat Pencapaian kurang 75% berarti tidak efektif

Menurut Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015

Efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan.

1.3.1 Rasio Efektivitas Periode 2013

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\frac{92.106.752.248,02}{81.554.926.490,00} \times 100\% = 113\%$$

1.3.2 Rasio Efektivitas Periode 2014

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\frac{113.817.278.385,97}{111.294.287.826,51} \times 100\% = 102\%$$

1.3.3 Rasio Efektivitas Periode 2015

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\frac{135.305.782.559,87}{135.492.246.486,70} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 4.7
Rasio Efektivitas Periode 2013 sd 2015

No	Periode	Uraian	%	Keterangan
1	2013	Rasio Efektivitas	113	Sangat Efektif
2	2014	Rasio Efektivitas	102	Sangat Efektif
3	2015	Rasio Efektivitas	100	Efektif

Sumber : Data Diolah Tahun 2017

Bila dilihat Tabel 4.7 bahwa Pengelolaan Keuangan daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang **baik** karena realisasi penerimaan PAD dibandingkan target penerimaan PAD berhasil mencapai rasio 100% bahkan diatas 100% .

2. Analisis Pengeluaran

Analisis Pengeluaran/belanja yang terdiri dari analisis varians belanja, rasio efisiensi belanja

2.1 Analisis Varians Belanja

Analisis Varians Belanja merupakan selisih antara realisasi belanja dengan anggaran.

Indikator apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan maka kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerahnya baik namun apabila realisasi belanja melebihi dari yang dianggarkan maka kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerahnya tidak baik. (Mahmudi,2016)

2.1.1 Varians Belanja Periode 2013

$$643.560.132.766,70 - 763.835.768.032,42 = (120.275.635.265,72)$$

Tabel 4.8

Analisis Varians Belanja Periode 2013

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN 2013 (Rp)	REALISASI 2013 (Rp)	ANALISIS VARIANS (Rp)	(%) Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	BELANJA	763.835.768.032,42	643.560.132.766,70	(120.275.635.265,72)	84
1.1.	BELANJA OPERASI	569.042.262.292,84	482.549.067.328,32	(86.493.194.964,52)	85
1.1.1.	Belanja Pegawai	371.830.471.023,54	332.650.128.079,14	(39.180.342.944,40)	89
1.1.2.	Belanja Barang	169.917.017.026,30	127.394.621.853,18	(42.522.395.173,12)	75
1.1.3.	Belanja Bunga	-	-	-	-
1.1.4.	Belanja Subsidi	-	-	-	-
1.1.5.	Belanja Hibah	25.154.360.600,00	21.148.996.396,00	(4.005.364.204,00)	84
1.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	2.140.413.643,00	1.355.321.000,00	(785.092.643,00)	63

1.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
1.2.	BELANJA MODAL	189.803.818.739,58	160.649.392.847,38	(29.154.425.892,20)	85
1.2.1.	Belanja Tanah	-	-	-	-
1.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	51.424.428.029,58	38.982.896.714,00	(12.441.531.315,58)	76
1.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	56.218.347.714,00	44.642.004.083,38	(11.576.343.630,62)	79
1.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	81.227.523.758,00	76.504.092.800,00	(4.723.430.958,00)	94
1.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	933.519.238,00	520.399.250,00	(413.119.988,00)	56
1.2.6.	Belanja Aset lainnya	-	-	-	-
1.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.544.604.000,00	5.827.891,00	(4.538.776.109,00)	13
1.3.1.	Belanja Tidak Terduga	4.544.604.000,00	5.827.891,00	(4.538.776.109,00)	13
1.4.	TRANSFER	445.083.000,00	355.844.700,00	(89.238.300,00)	80
1.4.1.	Transfer Bagi Hasil ke Desa	445.083.000,00	355.844.700,00	(89.238.300,00)	80
1.4.1.1.	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
1.4.1.2.	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
1.4.1.3.	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Bantuan Kepada Partai Politik	445.083.000,00	355.844.700,00	(89.238.300,00)	80

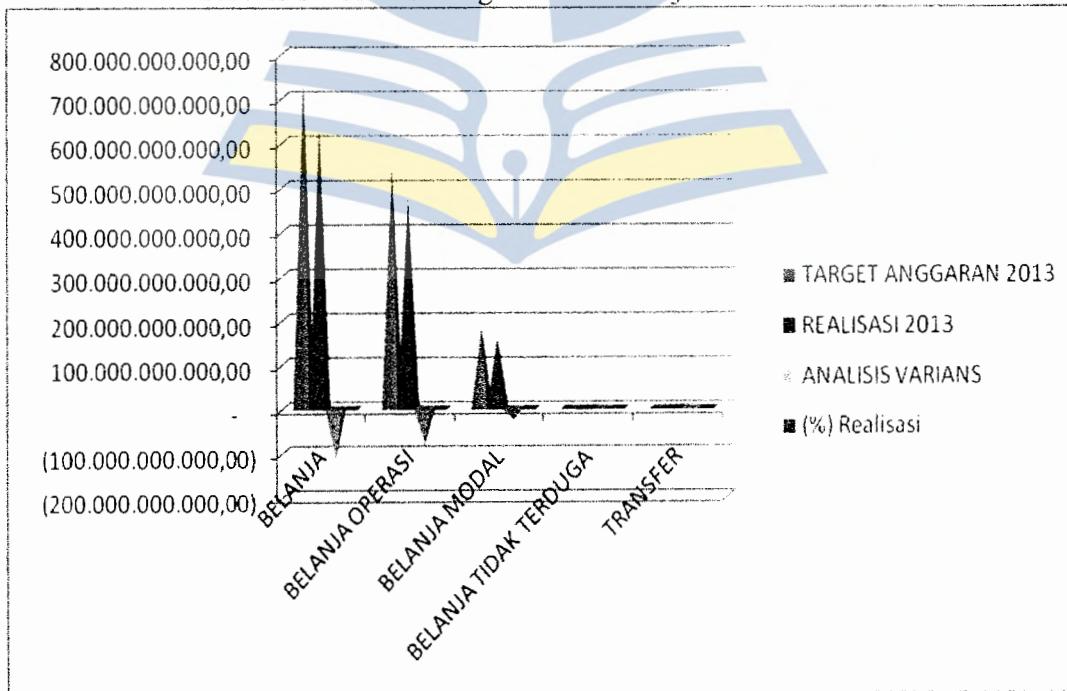
Sumber : Data Diolah Tahun 2017

ini:

Pengeluaran Belanja digambarkan dalam bentuk grafik seperti dibawah

Grafik 4.4

Analisis Varians Pengeluaran Belanja Periode 2013



Dari target anggaran pengeluaran belanja sebesar Rp 763.835.768.032,42 (Tujuh ratus enam puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen) terealisasi sebesar Rp 643.560.132.766,70 (Enam ratus empat puluh tiga milyar lima ratus enam puluh juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah tujuh puluh sen) sehingga Pemerintah Kota Pangkalpinang telah melakukan pengehematan anggaran sebesar Rp 120.275.635.265,72 (Seratus dua puluh milyar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh lima rupiah tujuh puluh dua sen) dengan presentase sebesar 84%.

Pada tahun 2013 Pemerintah Kota Pangkalpinang telah merealisasikan belanja operasi sebesar Rp 482.549.067.328,32 (Empat ratus delapan puluh dua milyar lima ratus empat puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah tiga puluh dua sen) dari target anggaran pengeluaran sebesar Rp 569.042.262.292,84 (Lima ratus enam puluh sembilan milyar empat puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh empat sen) sehingga penghematan sebesar Rp 86.493.194.964,52 (Delapan puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah lima puluh dua sen) atau sebesar 85 %.

Pada tahun 2013 Pemerintah Kota Pangkalpinang telah merealisasikan belanja modal sebesar Rp 160.649.392.847,38 (Seratus enam puluh milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah tiga puluh delapan sen) dari target anggaran pengeluaran

sebesar Rp 189.803.818.739,58 (Seratus delapan puluh sembilan milyar delapan ratus tiga juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah lima puluh delapan sen) sehingga penghematan sebesar Rp 29.154.425.892,20 (Dua puluh sembilan milyar seratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah dua puluh sen) atau sebesar 85%.

Pada tahun 2013 Pemerintah Kota Pangkalpinang telah merealisasikan belanja tidak terduga sebesar Rp 5.827.891,00 (Lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) dari target anggaran pengeluaran sebesar Rp 4.544.604.000,00 (Empat miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah) sehingga penghematan sebesar Rp 4.538.776.109,00 (Empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu seratus sembilan rupiah) atau sebesar 13 %.

Pada tahun 2013 Pemerintah Kota Pangkalpinang telah merealisasikan belanja transfer sebesar Rp 355.844.700,00 (Tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dari target anggaran pengeluaran sebesar Rp 445.083.000,00 (Empat ratus empat puluh lima juta delapan puluh tiga ribu rupiah) sehingga penghematan sebesar Rp 89.238.300,00 (Delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) atau sebesar 80%.

2.1.2 Varians Belanja Periode 2014

$$715.541.603.665,05 - 881.168.180.008,22 = (165.626.576.343,17)$$

Tabel 4.9
Analisis Varians Belanja Periode 2014

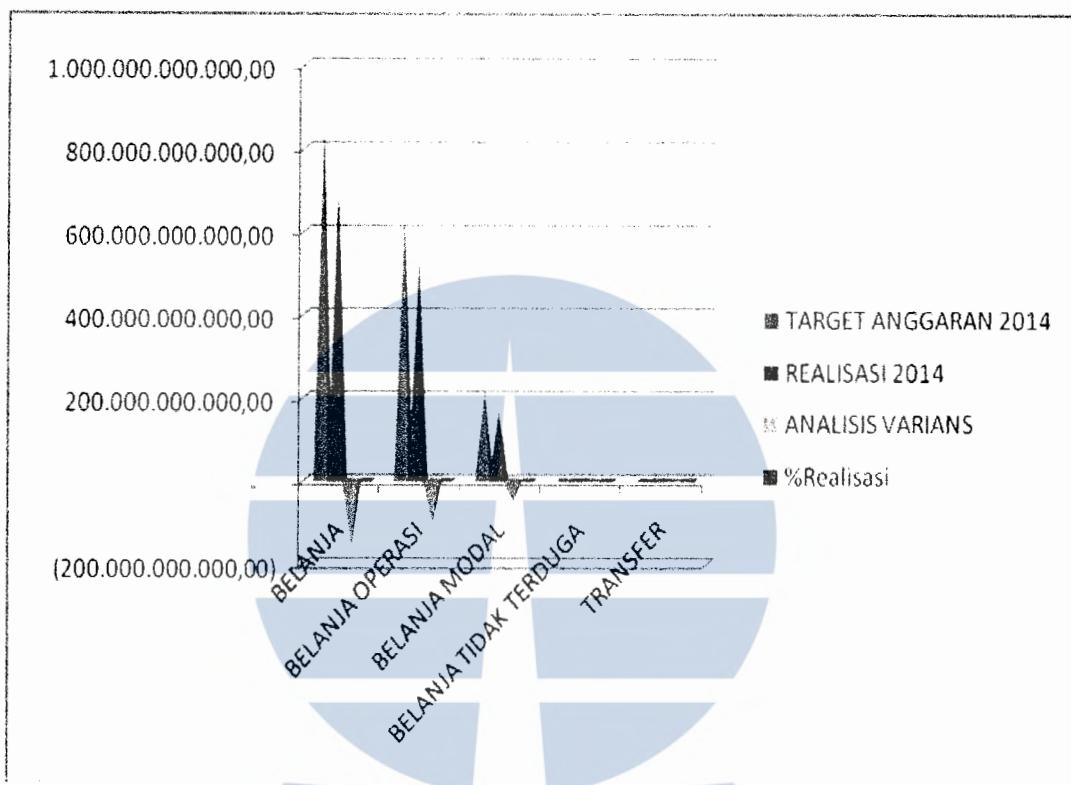
NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN 2014 (Rp)	REALISASI 2014 (Rp)	ANALISIS VARIANS (Rp)	(%) Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	BELANJA	881.168.180.008,22	715.541.603.665,05	(165.626.576.343,17)	81
1.1.	BELANJA OPERASI	654.261.540.056,22	544.645.692.198,05	(109.615.847.858,17)	83
1.1.1.	Belanja Pegawai	437.533.443.189,30	380.395.462.629,84	(57.137.980.559,46)	87
1.1.2.	Belanja Barang	194.099.919.416,92	145.009.806.159,21	(49.090.113.257,71)	75
1.1.3.	Belanja Bunga	-	-	-	-
1.1.4.	Belanja Subsidi	-	-	-	-
1.1.5.	Belanja Hibah	17.800.254.000,00	15.134.049.359,00	(2.666.204.641,00)	85
1.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	3.827.923.450,00	4.106.374.050,00	(721.549.400,00)	85
1.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
1.2.	BELANJA MODAL	224.437.556.952,00	170.446.721.009,00	(53.990.835.943,00)	76
1.2.1.	Belanja Tanah	3.728.661.237,00	-	(3.728.661.237,00)	-
1.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	57.209.253.598,00	40.771.811.290,00	(16.437.442.308,00)	71
1.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	63.416.625.683,00	37.171.964.259,00	(26.244.661.424,00)	59
1.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	95.617.226.226,00	91.105.643.922,00	(4.511.582.304,00)	95
1.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.465.790.208,00	1.397.301.538,00	(3.068.488.670,00)	31
1.2.6.	Belanja Aset lainnya	-	-	-	-
1.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.024.000.000,00	8.449.090,00	(2.015.550.910,00)	42
1.3.1.	Belanja Tidak Terduga	2.024.000.000,00	8.449.090,00	(2.015.550.910,00)	42
1.4.	TRANSFER	445.083.000,00	440.741.368,00	(4.341.632,00)	99
1.4.1.	Transfer Bagi Hasil ke Desa	445.083.000,00	440.741.368,00	(4.341.632,00)	99
1.4.1.1.	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
1.4.1.2.	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
1.4.1.3.	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Bantuan Kepada Partai Politik	445.083.000,00	440.741.368,00	(4.341.632,00)	99

Sumber : Data Diolah Tahun 2017

Pengeluaran Belanja digambarkan dalam bentuk grafik seperti dibawah ini:

Grafik 4.5

Analisis Varians Pengeluaran Belanja Periode 2014



Dari target anggaran pengeluaran belanja sebesar Rp 881.168.180.008,22 (Delapan ratus delapan puluh satu miliar seratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu delapan rupiah dua puluh dua sen) terealisasi sebesar Rp 715.541.603.665,05 (Tujuh ratus lima belas milyar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah lima sen) sehingga Pemerintah Kota Pangkalpinang telah melakukan pengehematan anggaran sebesar Rp 165.626.576.343,17 (Seratus enam puluh lima milyar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah tujuh belas sen) dengan presentase sebesar 81%.

Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Pangkalpinang telah merealisasikan belanja operasi sebesar Rp 544.645.692.198,05 (Lima ratus empat puluh empat milyar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah lima sen) dari target anggaran pengeluaran sebesar Rp 654.261.540.056,22 (Enam ratus lima puluh empat milyar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu lima puluh enam rupiah dua puluh dua sen) sehingga penghematan sebesar Rp 109.615.847.858,17 (Seratus sembilan milyar enam ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah tujuh belas sen) atau sebesar 83%.

Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Pangkalpinang telah merealisasikan belanja modal sebesar Rp 170.446.721.009,00 (Seratus tujuh puluh milyar empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan rupiah) dari target anggaran pengeluaran sebesar Rp 224.437.556.952,00 (Dua ratus dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) sehingga penghematan sebesar Rp 53.990.835.943,00 (Lima puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) atau sebesar 76%.

Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Pangkalpinang telah merealisasikan belanja tidak terduga sebesar Rp 8.449.090,00 (Delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) dari target anggaran pengeluaran sebesar Rp 2.024.000.000,00 (Dua milyar dua puluh empat juta rupiah) sehingga

penghematan sebesar Rp 2.015.550.910,00 (Dua milyar lima belas juta lima ratus lima puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) atau sebesar 42%.

Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Pangkalpinang telah merealisasikan belanja transfer sebesar Rp 440.741.368,00 (Empat ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) dari target anggaran pengeluaran sebesar Rp 445.083.000,00 (Empat ratus empat puluh lima juta delapan puluh tiga ribu rupiah) sehingga penghematan sebesar Rp 4.341.632,00 (Empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) atau sebesar 99%.

2.1.3 Varians Belanja Periode 2015

$$808.541.648.446,64 - 994.788.838.491,51 = (186.247.190.044,87)$$

Tabel 4.10
Analisis Varians Belanja Periode 2015

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN 2015 (Rp)	REALISASI 2015 (Rp)	ANALISIS VARIANS (Rp)	(%) Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	BELANJA	994.788.838.491,51	808.541.648.446,64	(186.247.190.044,87)	81
1.1	BELANJA OPERASI	732.299.740.656,66	611.917.346.158,04	(120.382.394.498,62)	84
1.1.1	Belanja Pegawai	480.009.547.718,47	425.755.935.639,84	(54.253.612.078,63)	89
1.1.2	Belanja Barang	234.270.081.347,19	170.684.313.498,20	(63.585.767.848,99)	73
1.1.3	Bunga	-	-	-	0
1.1.4	Subsidi	-	-	-	0
1.1.5	Hibah	16.123.469.500,00	14.440.765.120,00	(1.682.704.380,00)	90
1.1.6	Bantuan Sosial	1.896.642.091,00	1.036.331.900,00	(860.310.191,00)	55
1.2	BELANJA MODAL	260.899.097.834,85	196.105.837.101,00	(64.793.260.733,85)	75
1.2.1	Belanja Tanah	5.000.000.000,00	4.949.389.000,00	(50.611.000,00)	99
1.2.1	Belanja Peralatan dan Mesin	53.444.977.647,00	39.830.277.981,00	(13.614.699.666,00)	75
1.2.2	Belanja Gedung dan Bangunan	71.376.105.316,85	25.605.820.200,00	(45.770.285.116,85)	36

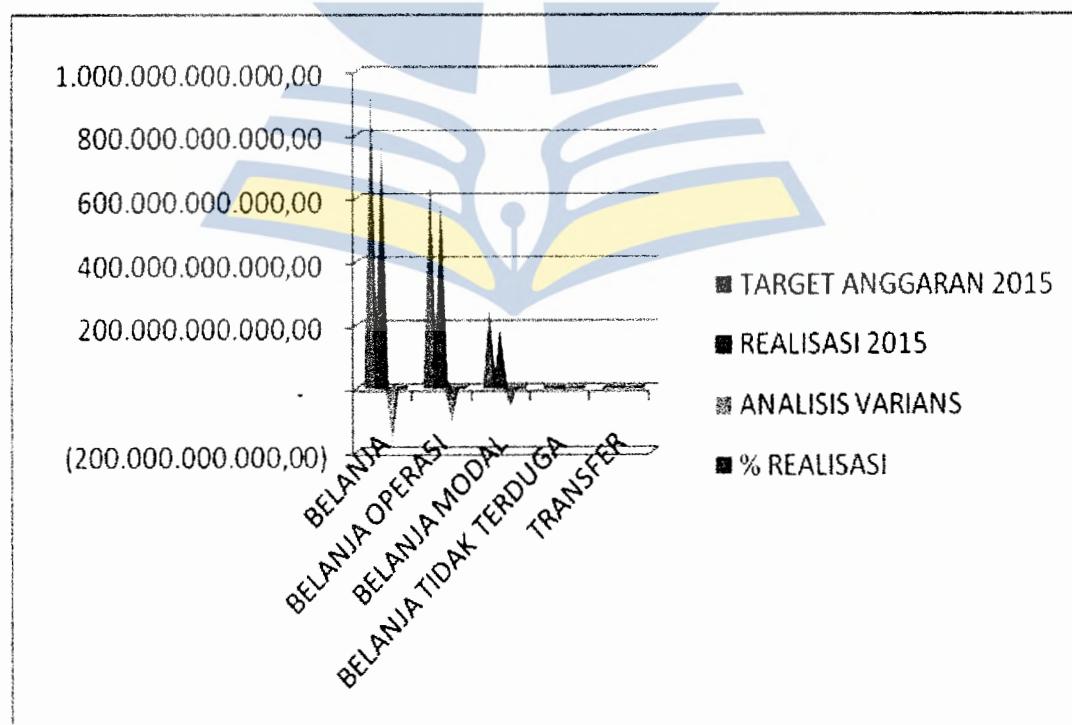
1.2.3	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	109.563.983.825,00	106.572.648.687,00	(2.991.335.138,00)	97
1.2.4	Belanja Aset Tetap Lainnya	21.514.031.046,00	19.147.701.233,00	(2.366.329.813,00)	89
1.2.5	Belanja Aset lainnya	-	-	-	0
1.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	800.000.000,00	4.233.614,00	(795.766.386,00)	53
1.3.1	Belanja Tidak Terduga	800.000.000,00	4.233.614,00	(795.766.386,00)	53
1.3.2	Jumlah Belanja	993.998.838.491,51	808.027.416.873,64	(185.971.421.617,87)	81
1.4	TRANSFER	790.000.000,00	514.231.573,00	(275.768.427,00)	65
1.4.1	Transfer / Bagi Hasil Ke Desa	-	-	-	-
1.4.2	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
1.4.3	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
1.4.4	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya (Bantuan Kepada Partai Politik)	790.000.000,00	514.231.573,00	(275.768.427,00)	65

Sumber : Data Diolah Tahun 2017

Pengeluaran Belanja digambarkan dalam bentuk grafik seperti dibawah ini:

Grafik 4.6

Analisis Varians Pengeluaran Belanja Periode 2015



Dari target anggaran pengeluaran belanja sebesar Rp 994.788.838.491,51 (Sembilan ratus sembilan puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah lima puluh satu sen) terealisasi sebesar Rp 808.541.648.446,64 (Delapan ratus delapan milyar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah enam puluh empat sen) sehingga Pemerintah Kota Pangkalpinang telah melakukan pengehematan anggaran sebesar Rp 186.247.190.044,87 (Seratus delapan puluh enam milyar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu empat puluh empat rupiah delapan puluh tujuh sen) dengan presentase sebesar 81%.

Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Pangkalpinang telah merealisasikan belanja operasi sebesar Rp 611.917.346.158,04 (Enam ratus sebelas milyar sembilan ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah empat sen) dari target anggaran pengeluaran sebesar Rp 732.299.740.656,66 (Tujuh ratus tiga puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah enam puluh enam sen) sehingga penghematan sebesar Rp 120.382.394.498,62 (Seratus dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh dua sen) atau sebesar 84%.

Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Pangkalpinang telah merealisasikan belanja modal sebesar Rp 196.105.837.101,00 (Seratus sembilan puluh enam milyar seratus lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus satu rupiah)

dari target anggaran pengeluaran sebesar Rp 260.899.097.834,85 (Dua ratus enam puluh milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah delapan puluh lima sen) sehingga penghematan sebesar Rp 64.793.260.733,85 (Enam puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah delapan puluh lima sen) atau sebesar 75%.

Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Pangkalpinang telah merealisasikan belanja tidak terduga sebesar Rp 4.233.614,00 (Empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah) dari target anggaran pengeluaran sebesar Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) sehingga penghematan sebesar Rp 795.766.386,00 (Tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) atau sebesar 53%.

Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Pangkalpinang telah merealisasikan belanja transfer sebesar Rp 514.231.573,00 (Lima ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dari target anggaran pengeluaran sebesar Rp 790.000.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) sehingga penghematan sebesar Rp 275.768.427,00 (Dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) atau sebesar 65%.

Berdasarkan target anggaran pengeluaran dan realisasi pengeluaran diatas maka dapat direkapitulasi varians belanja sebagai berikut :

Tabel 4.11

Rekapitulasi Varians Belanja Periode 2013 sd 2015

No	Periode	Uraian	Jumlah	%
1	2013	Varians Belanja	(120.275.635.265,72)	84
2	2014	Varians Belanja	(165.626.576.343,17)	81
3	2015	Varians Belanja	(186.247.190044,87)	81

Sumber : Data Diolah Tahun 2017

Bila kita melihat hasil dari rasio varians belanja setiap periode pada tabel 4.11 maka Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah daerah baik karena realiasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan akan tetapi jika dilihat secara keseluruhan yang paling baik pengelolaan keuangan adalah pada periode 2015 karena sudah ada penghematan anggaran sebesar Rp 186.247.190044,87 (Seratus delapan puluh enam miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu empat puluh empat rupiah delapan puluh tujuh sen).

2.2. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

$$\text{Rasio efisiensi belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Indikator apabila rasio efisiensi kurang dari 100% maka pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran belanja atau telah melakukan efisiensi

belanja dan apabila rasio efisiensi 100% maka pemerintah daerah dinilai telah melakukan pemborosan anggaran belanja/tidak efisien. (Mahmudi,2016)

Menurut Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 Efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

2.2.1 Rasio Efisiensi Belanja Periode 2013

$$\frac{643.560.132.766,70}{763.835.768.032,42} \times 100\% = 84\%$$

763.835.768.032,42

2.2.2 Rasio Efisiensi Belanja Periode 2014

$$\frac{715.541.603.665,05}{881.168.180.008,22} \times 100\% = 81\%$$

881.168.180.008,22

2.2.3 Rasio Efisiensi Belanja Periode 2015

$$\frac{808.541.648.446,64}{994.788.838.491,51} \times 100\% = 81\%$$

994.788.838.491,51

Tabel 4.12

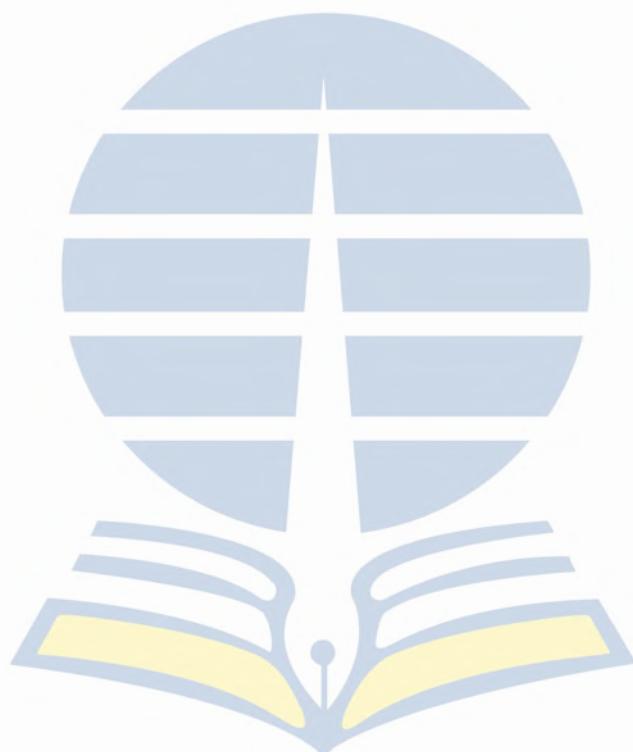
Rasio Efisiensi Periode 2013 sd 2015

No	Periode	Uraian	%	Keterangan
1	2013	Rasio Efisiensi	84	Efisien
2	2014	Rasio Efisiensi	81	Efisien
3	2015	Rasio Efisiensi	81	Efisien

Sumber : Data Diolah Tahun 2017

Bila dilihat dari rasio efisiensi belanja maka kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang **baik** dari tahun ketahun dikarenakan Pemerintah sudah melakukan

efisiensi penghematan anggaran dimana pada periode 2013 sebesar 84% menjadi 81,00% pada periode 2015.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerimaan

- Target anggaran penerimaan pada tahun 2015 sebesar Rp 853.965.575.459,70 (delapan ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen) sudah terealisasi penerimaan yang diperoleh Pemerintah Kota Pangkalpinang sebesar Rp 797.819.738.788,28 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh delapan sen) dengan varians/selisih yang tidak diharapkan (*unfavourable variance*) sebesar Rp 56.145.836.671,42 (Lima puluh enam milyar seratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah empat puluh dua sen) dengan persentasi sebesar 0,93 % secara keseluruhan penerimaan Pemerintah Kota Pangkalpinang dikatakan belum baik karena realisasi penerimaan masih dibawah target anggaran sebesar Rp 853.965.575.459,70 (Delapan ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen)

- Pertumbuhan pendapatan dari tahun 2013 sd 2015 mengalami pertumbuhan yang positif sehingga adanya peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Pangkalpinang yaitu terlihat bahwa setiap periode mengalami peningkatan.
- Apabila dilihat dari rasio efektivitas PAD dari Tahun 2013 sd 2015 maka kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang baik dikarenakan diatas 100%

2. Pengeluaran

- Apabila melihat hasil dari rasio varians belanja setiap periode maka Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah daerah baik karena realiasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan.
- Apabila dilihat dari rasio efesiensi belanja maka kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang baik dari tahun ketahun dikarenakan Pemerintah sudah melakukan penghematan anggaran dimana pada periode 2013 sebesar 84% menjadi 81,00% pada tahun 2015

B. Saran

1. Saran Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membahas lebih detil mengenai penerimaan dan pengeluaran sehingga dapat diketahui penerimaan yang mana paling berpeluang untuk meningkatkan penerimaan daerah serta pengeluaran yang mana yang berpotensi untuk menambah penerimaan daerah misalnya pembangunan gedung yang bisa digunakan untuk sewa gedung baik dalam perayaan acara-acara umum maupun pribadi sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam menambah pendapatan daerah.

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan adanya penerimaan yang lebih kecil dapat membayarkan pengeluaran pemerintah daerah sehingga demikian diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut.

2. Saran Untuk DPPKAD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah

Berdasarkan kesimpulan yang dilakukan maka saran yang ingin disampaikan antara lain:

1. Pengelolaan penerimaan pajak dan retribusi Pemerintah Kota Pangkalpinang lebih dioptimalisasi lagi agar tercapainya realiasi penerimaan yang meningkat misalnya menerbitkan karcis berlangganan parkir, mengoptimalkan para juru pungut agar lebih optimal dalam memungut pajak/retribusi, meningkatkan pelayanan/fasilitas di Tempat Pelelangan Ikan kepada pengguna jasa, seperti air, penerangan, keamanan dan ketertiban serta BBM.
2. Pemerintah Kota Pangkalpinang khususnya SKPKD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) secara rutin mengadakan sosialisasi dan bimtek mengenai penatausahaan,pelaporan penerimaan dan pengeluaran belanja kepada SKPKD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sehingga secara keseluruhan Aparatur Sipil Negara merasa bertanggungjawab agar tercapainya Pelaporan Keuangan yang baik dan wajar tanpa pengecualian
3. SKPKD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lebih proaktif dalam penyampaian laporan ke SKPKD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kota Pangkalpinang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah dan pusat.

4. Pemerintah khususnya Kota Pangkalpinang meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga para aparatur bertanggungjawab akan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing.



DAFTAR PUSTAKA

- Anjar N.V , I Wayan V dan Fridayana (2016). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dan Trend Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2004-2013.* e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 4 diambil dari situs World Wide Web : <http://ejurnal.undiksha.ac.id/index.php/JJM/article/view/4257>
- Alexano, Poppy. (2012). *Manajemen Keuangan Untuk Pemula Dan Orang Awam,* Jakarta : Laskar Aksara.
- Cherrya Dhia Wenny (2012).*Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan.* Jurnal Ilmiah STIE MDP, Volume 2 diambil pada tanggal 19 April 2017 dari situs World Wide Web : <http://eprints.mdp.ac.id/676/1/4.%20CHERRYA%20.pdf>
- Halim, Abdul. (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah.* : Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Halim Abdul, Restianto, I Wayan Karman (2010). *Sistem Akuntansi Sektor Publik: Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Kapita Selekta Sistem Akuntansi Sektor Publik .* Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Halim, Abdul. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah.* Jakarta : Salemba Empat.
- G.V.Languju, J.J.Tinangon dan R.J.Pusung (2015).*Evaluasi Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara.* Jurnal EMBA , Volume 3, diambil tanggal 05 Desember 2016 dari situs World Wide Web : <http://ejurnal.unsrat.ac.id/index.php/eimba/article/view/7809>
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Penerbit STIM YKPN. Yogyakarta.
- Murwanto,Rahmadi,Insyafiah,Subkhan (2006).*Manajemen Kas Sektor Publik.* Jakarta.
- Prabowo, Rohadi. (2012). *Analisis Pengelolaan Kas Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Provinsi DIY).* Yogyakarta : Tesis. Magister Manajemen.Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diambil pada tanggal 30 Nopember 2016 dari situs World Wide Web : <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t69740.pdf>

Sandy C.S, I Wayan S , Fridayana Y (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014*. Diambil pada tanggal 30 Nopember 2016 dari situs World Wide Web : <http://ejurnal.undiksha.ac.id/index.php/JJM/article/viewFile/6720/4581>

Subekti, Arif (20410). *Pengelolaan Kas Daerah Untuk Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan*. Jakarta.Tesis.Magister Ekonomi Universitas Indonesia. Diambil pada tanggal 30 Nopember 2016 dari situs World Wide Web : <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/136060-T%2028062-Pengelolaan%20Kas-HA.pdf>

Sugiyono.(2013). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung : Alfabeta

Susanto, Herry.(2014). *Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah Dalam Upaya Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Propinsi Nusa Tenggara Barat*, Artikel, diambil tanggal 30 Nopember 2016 dari situs World Wide Web <http://repository.ut.ac.id/1430/1/Artikel%20Hery%20Susanto.pdf>

Tanjung,Abdul Hafiz. (2009). *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPD*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta

Tanjung,Abdul Hafiz. (2011). *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPKD dan Pemerintah Daerah*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta

Udin Rinaldi. (2012). *Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Artikel, Volume 8 Diambil pada tanggal 19 April 2017 dari situs World Wide Web <http://repository.polnep.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/87/06-eksos%204%20-%20udin%20rinaldi.pdf?sequence=1>

Yunanto,Lilik.(2010). *Analisis Potensi, Upaya Pajak,Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.*

Yuncita Anisma , Elian Susanti. *Evaluasi Manajemen Pengelolaan Kas*. Jurnal Ekonomi, vol. 18, No.16, (Maret 2010) diambil pada tanggal 30 Nopember 2016 dari situs World Wide Web : <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=31423&val=2268>

DOKUMEN

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diambil pada tanggal 30 Nopember 2016 dari situs World Wide Web : http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2015/Perda_PangkalPinang10.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007. Edisi Tahun 2008. Penerbit Fokus Media

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya. 2009. Penerbit Fokus Media

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2012. Penerbit Salemba Empat

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak diambil pada tanggal 30 Nopember 2016 dari situs World Wide Web : <http://peraturan.go.id/uu/nomor-20-tahun-1997.html>

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diambil pada tanggal 30 Nopember 2016 dari situs World Wide Web : <http://djpk.depkeu.go.id/?p=351>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diambil pada tanggal 30 Nopember 2016 dari situs World Wide Web : <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2004/1TAHUN2004UU.htm>

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Negara diambil pada tanggal 30 Nopember 2016 dari situs World Wide Web : <http://www.peraturan.go.id/uu/nomor-15-tahun-2004.htm>

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diambil pada tanggal 30 Nopember 2016 dari situs World Wide Web : <http://www.peraturan.go.id/uu/nomor-33-tahun-2004.html>

Lampiran 1

Komposisi Target Anggaran Penerimaan Pemerintah Kota Pangkalpinang

Periode 2013

NOMOR	URAIAN	TARGET ANGGARAN (Rp)
1	2	3
1	PENDAPATAN	657.998.836.219,00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	81.554.926.490,00
1.1.1.	Pendapatan Daerah	34.220.000.000,00
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	15.016.298.500,00
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.800.000.000,00
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	28.518.627.990,00
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	575.443.909.729,00
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	470.485.379.674,00
2.1.1.	Dana Bagi Hasil Pajak	28.067.898.592,00
1.2.1.2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	25.369.918.082,00
1.2.1.3.	Dana Alokasi Umum	384.421.523.000,00
1.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus	32.626.040.000,00
1.2.2.	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	38.203.724.000,00
1.2.2.1.	Dana Otonomi Khusus	-
1.2.2.2.	Dana Penyesuaian	38.203.724.000,00
1.2.2.3.	Dana Desentralisasi dan Penguatan Fiskal	-
1.2.3.	Transfer Pemerintah Provinsi	66.754.806.055,00
1.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	38.114.566.055,00
1.2.3.2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	28.640.240.000,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	1.000.000.000,00
1.3.1.	Pendapatan Hibah	1.000.000.000,00
1.3.2.	Pendapatan Dana Darurat	-
1.3.3.	Pendapatan Lainnya	-
JUMLAH		657.998.836.219,00

Sumber : DPPKAD Kota Pangkalpinang Tahun 2017

1.1 Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli daerah sebesar Rp 81.554.926.490,00 merupakan target yang diperoleh dari :

1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp 34.220.000.000,00 yang terdiri dari :

• Pajak Hotel	Rp	1.200.000.000,00
• Pajak Restoran	Rp	3.500.000.000,00
• Pajak Hiburan	Rp	1.300.000.000,00
• Pajak Reklame	Rp	1.300.000.000,00
• Pajak Penerangan Jalan	Rp	8.500.000.000,00
• Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp	2.000.000.000,00
• Pajak Parkir	Rp	150.000.000,00
• Pajak Sarang Burung Walet	Rp	120.000.000,00
• Pajak Air Tanah	Rp	250.000.000,00
• Pajak BPHTB	Rp	9.000.000.000,00
• Pajak Bumi dan Bangunan	Rp	6.900.000.000,00
• Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	Rp	34.220.000.000,00

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp 15.016.298.500,00 yang terdiri dari :

1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

• Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Rp	850.560.000,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Rp	988.740.000,00
• Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta		

Catatan Sipil	Rp	308.625.000,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp	900.000.000,00
• Retribusi Pelayanan Pasar	Rp	303.300.000,00
• Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp	600.000.000,00
• Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Rp	30.000.000,00
• Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus	Rp	45.000.000,00
Jumlah Retribusi Jasa Umum	Rp	4.026.225.000,00

1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp	1.449.863.500,00
• Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	Rp	664.500.000,00
• Retribusi Jasa Usaha Pelelangan Ikan	Rp	600.000.000,00
• Retribusi Terminal	Rp	80.000.000,00
• Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir (RSUD)	Rp	26.500.000,00
• Retribusi Pantai Pasir Padi	Rp	175.000.000,00
• Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir (TPI/PPI)	Rp	125.000.000,00
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Rp	207.200.000,00
• Retribusi Rumah Potong Hewan	Rp	200.010.000,00

- Retribusi Jasa Usaha Pelayanan

Kepelabuhan Rp 27.000.000,00

Jumlah Retribusi Jasa Usaha Rp 3.555.073.500,00

1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

- Retribusi Izin Gangguan (SIG) Rp 1.200.000.000,00

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rp 6.000.000.000,00

- Retribusi Izin Trayek Rp 75.000.000,00

- Retribusi Jasa Usaha Tempat Penjualan

Minuman Beralkohol Rp 0,00

- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp 160.000.000,00

Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu Rp 7.435.000.000,00

Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah Rp 15.016.298.500,00

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar

Rp 3.800.000.000,00 yang terdiri dari

- Bagian Laba Atas Penyertaan Modal/

Investasi kepada Pihak Ketiga Rp 3.800.000.000,00

Jumlah Rp 3.800.000.000,00

1.1.4 Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 28.518.627.990,00 yang terdiri dari :

- Jasa Giro Kas Daerah Rp 4.195.800.000,00

- Penerimaan Bunga Deposito Rp 1.000.000.000,00

- Pendapatan dari Denda Keterlambatan Rp 0,00

• Pendapatan dari Denda Pajak	Rp	0,00
• Pendapatan dari Denda Retribusi	Rp	0,00
• Pendapatan dari Pengembalian	Rp	0,00
• Pendapatan dari Kelebihan Penyetoran		
Pajak	Rp	0,00
Retribusi	Rp	0,00
• Pendapatan dari Kelebihan Penyetoran		
Hasil Penjualan Aset Daerah yang		
tidak dipisahkan	Rp	208.261.935,00
• Pendapatan dari BLUD (RSUD)	Rp	23.114.566.055,00
Jumlah Lain-lain PAD yang syah	Rp	28.518.627.990,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp	81.554.926.490,00

1.2 Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer sebesar Rp 575.443.909.729,00 merupakan target yang diperoleh dari :

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 28.067.898.592,00 yang terdiri dari :

• Pajak Bumi dan Bangunan	Rp	14.503.826.010,00
• Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 25 dan 29 Orang Pribadi,		
• PPh Pasal 21	Rp	13.564.072.582,00
Jumlah Bagi Hasil Pajak	Rp	28.067.898.592,00

1.2.1.2 Bagi Sumber Daya Alam sebesar Rp 25.369.918.082,00 terdiri dari :

• Provisi Sumber Daya Hutan	Rp	5.851.051,00
-----------------------------	----	--------------

• Iuran Tetap (Landrent)	Rp	0
• Iuran Eksplorasi dan Eksplorasi (Royalty)	Rp	22.939.320.600,00
• Pungutan Pengusahaan Perikanan	Rp	289.738.431,00
• Pertambangan Minyak Bumi	Rp	<u>2.135.008.000,00</u>
Jumlah Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp	25.369.918.082,00

1.2.1.3 Dana Alokasi Umum sebesar Rp 384.421.523.000,00 terdiri dari :

• Dana Alokasi Umum	Rp	<u>384.421.523.000,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum	Rp	<u>384.421.523.000,00</u>

1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 32.626.040.000,00 terdiri dari :

• Dana Alokasi Khusus	Rp	<u>32.626.040.000,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus	Rp	<u>32.626.040.000,00</u>

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan **Rp** **470.485.379.674,00**

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

1.2.2.1 Dana Penyesuaian sebesar Rp 38.203.000.000,00 terdiri dari :

• Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus	Rp	<u>38.203.000.000,00</u>
Dinas Pendidikan	Rp	<u>38.203.000.000,00</u>

Jumlah Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat-Lainnya **Rp** **38.203.000.000,00**

1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 38.114.566.055,00 terdiri dari :

• Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp	9.000.000.000,00
• Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp	6.000.000.000,00
(BBNKB)	Rp	6.000.000.000,00

• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rp	22.114.566.055,00
• Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	Rp	1.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp	38.114.566.055,00

1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya sebesar Rp 28.640.240.000,00 terdiri dari :

• Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Bangka Belitung	Rp	28.640.240.000,00
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp	28.640.240.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	Rp	66.754.806.055,00
Jumlah Pendapatan Transfer	Rp	575.443.909.729,00

1.3 Lain-lain Pendapatan yang Syah

1.3.1 Pendapatan Hibah sebesar Rp 1.000.000.000,00 terdiri dari :

• Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri	Rp	1.000.000.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	1.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	657.998.836.219,00

Lampiran 2

Komposisi Target Anggaran Penerimaan Pemerintah Kota Pangkalpinang

Periode 2014

NOMOR	URAIAN	TARGET ANGGARAN (Rp)
1	2	3
1	PENDAPATAN	763.679.230.449,51
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	111.294.287.826,51
1.1.1.	Pendapatan Daerah	45.175.000.000,00
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	15.194.021.000,00
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.000.000.000,00
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	46.925.266.826,51
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	652.384.942.623,00
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	504.369.613.623,00
1.2.1.1.	Dana Bagi Hasil Pajak	24.637.442.540,00
1.2.1.2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	24.177.648.083,00
1.2.1.3.	Dana Alokasi Umum	414.685.923.000,00
1.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus	40.868.600.000,00
1.2.2.	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	73.142.789.000,00
1.2.2.1.	Dana Otonomi Khusus	-
1.2.2.2.	Dana Penyesuaian	73.142.789.000,00
1.2.2.3.	Dana Desentralisasi dan Penguatan Fiskal	-
1.2.3.	Transfer Pemerintah Provinsi	74.872.540.000,00
1.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	36.000.000.000,00
1.2.3.2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	38.872.540.000,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-
1.3.1.	Pendapatan Hibah	-
1.3.2.	Pendapatan Dana Darurat	-
1.3.3.	Pendapatan Lainnya	-
JUMLAH		763.679.230.449,51

Sumber : DPPKAD Kota Pangkalpinang Tahun 2017

1.1. Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli daerah sebesar Rp 111.294.287.826,51 merupakan target yang diperoleh dari :

1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp 45.175.000.000,00 yang terdiri dari :

• Pajak Hotel	Rp	1.400.000.000,00
• Pajak Restoran	Rp	4.200.000.000,00
• Pajak Hiburan	Rp	1.500.000.000,00
• Pajak Reklame	Rp	1.500.000.000,00
• Pajak Penerangan Jalan	Rp	10.500.000.000,00
• Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp	3.000.000.000,00
• Pajak Parkir	Rp	200.000.000,00
• Pajak Sarang Burung Walet	Rp	100.000.000,00
• Pajak Air Tanah	Rp	275.000.000,00
• Pajak BPHTB	Rp	13.500.000.000,00
• Pajak Bumi dan Bangunan	Rp	9.000.000.000,00
• Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	Rp	45.175.000.000,00

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp 15.194.021.000,00 yang terdiri dari :

1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

• Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Rp	453.672.500,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Rp	1.150.000.000,00
• Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta		

Catatan Sipil	Rp	26.985.000,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp	720.000.000,00
• Retribusi Pelayanan Pasar	Rp	450.000.000,00
• Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp	600.000.000,00
• Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Rp	45.000.000,00
• Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus	Rp	25.000.000,00
• Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Rp	175.000.000,00
Jumlah Retribusi Jasa Umum	Rp	3.645.657.500,00

1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp	1.463.363.500,00
• Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	Rp	232.000.000,00
• Retribusi Jasa Usaha Pelelangan Ikan	Rp	800.000.000,00
• Retribusi Terminal	Rp	80.000.000,00
• Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir (RSUD)	Rp	40.000.000,00
• Retribusi Pantai Pasir Padi	Rp	200.000.000,00
• Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir (TPI/PPI)	Rp	125.000.000,00
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Rp	300.000.000,00

• Retribusi Rumah Potong Hewan	Rp	213.000.000,00
Jumlah Retribusi Jasa Usaha	Rp	3.453.363.500,00

1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

• Retribusi Izin Gangguan (SIG)	Rp	2.000.000.000,00
• Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Rp	6.000.000.000,00
• Retribusi Izin Trayek	Rp	75.000.000,00
• Retribusi Jasa Usaha Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Rp	20.000.000,00
Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu	Rp	8.095.000.000,00

Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah

Rp 15.194.021.000,00

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 4.000.000.000,00 yang terdiri dari

• Bagian Laba Atas Penyertaan Modal/ Investasi kepada Pihak Ketiga	Rp	4.000.000.000,00
Jumlah	Rp	4.000.000.000,00

1.1.4 Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 46.925.266.826,51 yang terdiri dari :

• Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	Rp	7.156.000.000,00
• Jasa Giro Kas Daerah	Rp	4.195.800.000,00
• Penerimaan Bunga Deposito	Rp	2.000.000.000,00
• Pendapatan dari Denda Keterlambatan	Rp	0,00
• Pendapatan dari Denda Pajak	Rp	0,00

• Pendapatan dari Denda Retribusi	Rp	0,00
• Pendapatan dari Pengembalian	Rp	0,00
• Pendapatan dari Kelebihan Penyetoran		
Pajak	Rp	0,00
Retribusi	Rp	0,00
• Pendapatan dari Kelebihan Penyetoran		
Rumah Dinas	Rp	1.777.000.000,00
• Pendapatan dari BLUD (RSUD)	Rp	28.086.919.826,51
• Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Rp	3.709.547.000,00
Jumlah Lain-lain PAD yang syah	Rp	46.925.266.826,51
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp	111.294.287.826,51

1.1 Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer sebesar Rp 652.384.942.623,00 merupakan target yang diperoleh dari :

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 24.637.442.540,00 yang terdiri dari :

• Pajak Bumi dan Bangunan	Rp	8.811.533.102,00
• Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 25 dan 29 Orang Pribadi,		
• PPh Pasal 21	Rp	15.825.909.438,00
Jumlah Bagi Hasil Pajak	Rp	24.637.442.540,00

1.2.1.2 Bagi Sumber Daya Alam sebesar Rp 24.177.648.083,00 terdiri dari :

• Provisi Sumber Daya Hutan	Rp	0,00
-----------------------------	----	------

• Iuran Tetap (Landrent)	Rp	0
• Iuran Eksplorasi dan Eksplorasi (Royalty)	Rp	21.425.815.600,00
• Pungutan Pengusahaan Perikanan	Rp	329.030.883,00
• Pertambangan Minyak Bumi	Rp	2.422.801.600,00
Jumlah Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp	24.177.648.083,00

1.2.1.3 Dana Alokasi Umum sebesar Rp 414.685.923.000,00 terdiri dari :

• Dana Alokasi Umum	Rp	414.685.923.000,00
Jumlah Dana Alokasi Umum	Rp	414.685.923.000,00

1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 40.868.600.000,00 terdiri dari :

• Dana Alokasi Khusus	Rp	40.868.600.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus	Rp	40.868.600.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp	504.369.613.623,00

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

1.2.2.1 Dana Penyesuaian sebesar Rp 73.142.789.000,00 terdiri dari :

• Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus	Dinas Pendidikan	Rp	73.142.789.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer			
Pemerintah Pusat-Lainnya		Rp	73.142.789.000,00

1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 36.000.000.000,00 terdiri dari :

• Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp	9.000.000.000,00
• Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rp	6.000.000.000,00

• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rp	20.000.000.000,00
• Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	Rp	<u>1.000.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp	36.000.000.000,00

1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya sebesar Rp 38.872.540.000,00 terdiri dari :

• Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Bangka Belitung	Rp	<u>38.872.540.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp	<u>38.872.540.000,00</u>
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	Rp	<u>74.872.540.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer	Rp	<u>652.384.942.623,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp	<u>763.679.230.449,51</u>



Lampiran 3

Komposisi Target Anggaran Penerimaan Pemerintah Kota Pangkalpinang

Periode 2015

NOMOR	U R A I A N	TARGET ANGGARAN (Rp)
1	2	3
1	PENDAPATAN	853.965.575.459,70
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	135.492.246.486,70
1.1.1.	Pendapatan Daerah	60.600.000.000,00
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	17.712.600.000,00
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.200.000.000,00
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	52.979.646.486,70
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	718.473.328.973,00
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	574.789.879.854,00
1.2.1.1.	Dana Bagi Hasil Pajak	24.882.993.000,00
1.2.1.2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	51.496.067.854,00
1.2.1.3.	Dana Alokasi Umum	419.863.119.000,00
1.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus	78.547.700.000,00
1.2.2.	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	54.097.479.000,00
1.2.2.1.	Dana Otonomi Khusus	
1.2.2.2.	Dana Penyesuaian	54.097.479.000,00
1.2.2.3.	Dana Desentralisasi dan Penguatan Fiskal	
1.2.3.	Transfer Pemerintah Provinsi	89.585.970.119,00
1.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	48.397.950.119,00
1.2.3.2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	41.188.020.000,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-
1.3.1.	Pendapatan Hibah	-
1.3.2.	Pendapatan Dana Darurat	-
1.3.3.	Pendapatan Lainnya	-
JUMLAH		853.965.575.459,70

Sumber : DPPKAD Kota Pangkalpinang Tahun 2017

1.1 Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli daerah sebesar Rp 135.492.246.486,70 merupakan target yang diperoleh dari :

1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp 60.600.000.000,00 yang terdiri dari :

• Pajak Hotel	Rp	1.800.000.000,00
• Pajak Restoran	Rp	5.000.000.000,00
• Pajak Hiburan	Rp	1.900.000.000,00
• Pajak Reklame	Rp	2.500.000.000,00
• Pajak Penerangan Jalan	Rp	16.750.000.000,00
• Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp	4.000.000.000,00
• Pajak Parkir	Rp	225.000.000,00
• Pajak Sarang Burung Walet	Rp	100.000.000,00
• Pajak Air Tanah	Rp	250.000.000,00
• Pajak BPHTB	Rp	18.825.000.000,00
• Pajak Bumi dan Bangunan	Rp	9.250.000.000,00
• Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	Rp	60.600.000.000,00

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp 17.712.600.000,00 yang terdiri dari :

1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

• Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Rp	102.172.500,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Rp	1.600.000.000,00
• Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta		

Catatan Sipil	Rp	0,00
---------------	----	------

- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi

Jalan Umum	Rp	1.000.000.000,00
------------	----	------------------

- Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp	600.000.000,00
----------------------------------------	----	----------------

- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam

Kebakaran	Rp	45.000.000,00
-----------	----	---------------

- Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan

Kakus	Rp	25.000.000,00
-------	----	---------------

Jumlah Retribusi Jasa Umum	Rp	3.872.172.500,00
-----------------------------------	-----------	-------------------------

1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Terminal	Rp	2.219.520.000,00
--------------------	----	------------------

- Retribusi Tempat Parkir Khusus Pasir Padi

Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir (TPI/PPI)	Rp	200.000.000,00
-----------------------------------------------------	----	----------------

- Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	Rp	125.000.000,00
----------------------------------	----	----------------

- Retribusi Pelelangan Ikan

Retribusi Pelayanan Parkir di RSUD	Rp	232.000.000,00
------------------------------------	----	----------------

- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Jumlah Retribusi Jasa Usaha	Rp	4.023.520.000,00
------------------------------------	-----------	-------------------------

1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

• Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Rp	6.000.000.000,00
• Retribusi Izin Gangguan (SIG)	Rp	3.500.000.000,00
• Retribusi Izin Trayek	Rp	75.000.000,00
• Retribusi Jasa Usaha Tempat Penjualan Minuman Berakohol	Rp	29.307.500,00
• Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Tenaga Asing	Rp	12.600.000,00
• Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Rp	200.000.000,00
Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu	Rp	9.816.907.500,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah	Rp	17.712.600.000,00

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 4.200.000.000,00 yang terdiri dari

• Bagian Laba Atas Penyertaan Modal/ Investasi kepada Pihak Ketiga	Rp	4.200.000.000,00
Jumlah	Rp	4.200.000.000,00

1.1.4 Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 52.979.646.486,70 yang terdiri dari :

• Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak dipisahkan	Rp	100.000.000,00
• Jasa Giro Kas Daerah	Rp	4.170.800.000,00
• Penerimaan Bunga Deposito	Rp	4.000.000.000,00
• Denda atas Keterlambatan		

Pelaksanaan Pekerjaan	Rp	14.200.000,00
• Pendapatan Denda Pajak	Rp	579.276.499,00
• Pendapatan Denda Retribusi	Rp	40.737.040,00
• Angsuran Cicilan Penjualan	Rp	1.777.000.000,00
• Pendapatan dari Pengembalian	Rp	745.374.625
• Pendapatan dari Kelebihan Penyetoran Pajak	Rp	50.000,00
• Dana Kapitasi JKN	Rp	4.669.469.650,00
• Pendapatan dari BLUD (RSUD)	Rp	36.882.738.672,70
Jumlah Lain-lain PAD yang syah	Rp	52.979.646,486,70
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp	135.492.246.486,70,00

1.2 Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer sebesar Rp 718.473.328.973,00 merupakan target yang diperoleh dari :

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 24.882.993.000,00 yang terdiri dari :

• Pajak Bumi dan Bangunan	Rp	11.951.902.000,00
• PPh Orang Pribadi,	Rp	12.931.091.000,00
Jumlah Bagi Hasil Pajak	Rp	24.882.993.000,00

1.2.1.2 Bagi Sumber Daya Alam sebesar Rp 51.496.067.854,00 terdiri dari :

• Pungutan Pengusahaan Perikanan	Rp	977.791.933,00
• Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan	Rp	1.103.009.000,00
• Sumber Daya Alam Kehutanan	Rp	2.170.365,00

• Iuran Eksplorasi (Royalty)	Rp	49.394.260.122,00
• Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Landrent)	Rp	18.836.434,00
Jumlah Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp	51.496.067.854,00

1.2.1.3 Dana Alokasi Umum sebesar Rp 419.863.119.000,00 terdiri dari :

• Dana Alokasi Umum	Rp	419.863.119.000,00
Jumlah Dana Alokasi Umum	Rp	419.863.119.000,00

1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 78.547.700.000,00 terdiri dari :

• Dana Alokasi Khusus	Rp	78.547.700.000,00
• Jumlah Dana Alokasi Khusus	Rp	78.547.700.000,00

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan **Rp** **574.789.879.854,00**

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

1.2.2.1 Dana Penyesuaian Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus Dinas Pendidikan sebesar Rp 54.097.479.000,00 terdiri dari :

• Tunjangan Profesi Guru	Rp	53.368.979.000,00
• Tambahan Penghasilan Guru PNSD	Rp	728.500.000,00

Jumlah Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat-Lainnya **Rp** **54.097.479.000,00**

1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 48.397.950.119,00 terdiri dari :

• Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp	11.000.000.000,00
• Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rp	9.000.000.000,00
• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		

(PBBKB)	Rp	22.000.000.000,00
---------	----	-------------------

- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan

Air Permukaan	Rp	1.000.000.000,00
---------------	----	------------------

- Dana Bagi Hasil Pajak Rokok

<u>Rp</u>	<u>5.397.950.119,00</u>
-----------	-------------------------

Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp	48.397.950.119,00
-------------------------------------------	-----------	--------------------------

1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya sebesar Rp 41.188.020.000,00 terdiri dari :

- Bantuan Keuangan dari Pemerintah

Provinsi Bangka Belitung	Rp	41.188.020.000,00,00
--------------------------	----	----------------------

Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp	41.188.020.000,0000
---------------------------------------------	-----------	----------------------------

Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	Rp	89.585.970.119,00
--------------------------------------------	-----------	--------------------------

Jumlah Pendapatan Transfer	Rp	718.473.328.973,00
-----------------------------------	-----------	---------------------------

Jumlah Pendapatan	Rp	853.965.575.459,70
--------------------------	-----------	---------------------------

1.2. Realisasi Penerimaan

Realisasi Penerimaan yang diperoleh DPPKAD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah periode 2013 s.d 2015

Lampiran 4

Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Pangkalpinang

Periode 2013

NOMOR	URAIAN	REALISASI (Rp)
1	2	3
1	PENDAPATAN	662.197.444.473,99
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	92.106.752.248,02
1.1.1.	Pendapatan Daerah	47.978.125.915,70
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	16.134.938.007,00
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.841.426.516,29
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	24.152.261.809,03
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	569.883.066.755,97
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	469.708.594.566,00
1.2.1.1.	Dana Bagi Hasil Pajak	28.738.981.151,00
1.2.1.2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	23.922.050.415,00
1.2.1.3.	Dana Alokasi Umum	384.421.523.000,00
1.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus	32.626.040.000,00
1.2.2.	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	38.203.724.000,00
1.2.2.1.	Dana Otonomi Khusus	-
1.2.2.2.	Dana Penyesuaian	38.203.724.000,00
1.2.2.3.	Dana Desentralisasi dan Penguatan Fiskal	-
1.2.3.	Transfer Pemerintah Provinsi	61.970.748.189,97
1.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	39.557.422.189,97
1.2.3.2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	22.413.325.900,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	207.625.470,00
1.3.1.	Pendapatan Hibah	207.625.470,00
1.3.2.	Pendapatan Dana Darurat	-
1.3.3.	Pendapatan Lainnya	-
JUMLAH		662.197.444.473,99

Sumber : DPPKAD Kota Pangkalpinang Tahun 2017

1.1 Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli daerah sebesar Rp 92.106.752.248,02 merupakan Realisasi yang diperoleh dari :

1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp 34.220.000.000,00 yang terdiri dari :

• Pajak Hotel	Rp	1.372.383.732,00
• Pajak Restoran	Rp	3.800.564.165,00
• Pajak Hiburan	Rp	1.745.407.787,00
• Pajak Reklame	Rp	1.395.386.711,75
• Pajak Penerangan Jalan	Rp	11.229.199.816,00
• Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp	4.399.420.244,45
• Pajak Parkir	Rp	251.892.850,00
• Pajak Sarang Burung Walet	Rp	130.355.000,00
• Pajak Air Tanah	Rp	252.452.925,00
• Pajak BPHTB	Rp	14.664.666.401,50
• Pajak Bumi dan Bangunan	Rp	8.736.396.283,00
• Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	Rp	47.978.125.915,70

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp 16.134.938.007,00 yang terdiri dari :

1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

• Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Rp	511.340.159,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Rp	997.120.000,00
• Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta		

Catatan Sipil	Rp	373.675.000,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		
Jalan Umum	Rp	542.085.000,00
• Retribusi Pelayanan Pasar		
	Rp	422.002.000,00
• Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		
	Rp	655.715.386,00
• Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran		
Kebakaran	Rp	33.756.000,00
• Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus		
Kakus	Rp	15.220.000,00
Jumlah Retribusi Jasa Umum		Rp 3.550.913.545,00
1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha		
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
	Rp	2.506.527.190,00
• Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan		
	Rp	262.250.000,00
• Retribusi Jasa Usaha Pelelangan Ikan		
	Rp	336.830.975,00
• Retribusi Terminal		
	Rp	100.050.000,00
• Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir (RSUD)		
	Rp	43.827.000,00
• Retribusi Pantai Pasir Padi		
	Rp	194.952.000,00
• Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir (TPI/PPI)		
	Rp	51.700.000,00
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga		
	Rp	188.450.000,00
• Retribusi Rumah Potong Hewan		
	Rp	211.260.000,00

- Retribusi Jasa Usaha Pelayanan

Kepelabuhan	Rp	0,00
Jumlah Retribusi Jasa Usaha	Rp	3.895.847.165,00

1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

- Retribusi Izin Gangguan (SIG) Rp 2.124.988.500,00
 - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rp 6.219.496.010,00
 - Retribusi Izin Trayek Rp 71.500.000,00
 - Retribusi Jasa Usaha Tempat Penjualan Minuman Berakohol Rp 14.500.000,00
 - Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp 257.692.787,00
- | | | |
|--------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu | Rp | 8.688.177.297,00 |
| Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah | Rp | 16.134.938.007,00 |

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar

Rp 3.841.426.516,29 yang terdiri dari

- Bagian Laba Atas Penyertaan Modal/
Investasi kepada Pihak Ketiga Rp 3.841.426.516,29
- | | | |
|---------------|-----------|-------------------------|
| Jumlah | Rp | 3.841.426.516,29 |
|---------------|-----------|-------------------------|

1.1.4 Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 24.152.261.809,03 yang terdiri dari :

- Jasa Giro Kas Daerah Rp 3.583.313.673,91
- Penerimaan Bunga Deposito Rp 1.027.602.725,84
- Pendapatan dari Denda Keterlambatan Rp 68.091.670,00

• Pendapatan dari Denda Pajak	Rp	356.206.319,00
• Pendapatan dari Denda Retribusi	Rp	99.847.220,00
• Pendapatan dari Pengembalian	Rp	1.401.548.862,28
• Pendapatan dari Kelebihan Penyetoran		
Pajak	Rp	3.119,50
Retribusi	Rp	10.000,00
• Hasil Penjualan Aset Daerah yang		
tidak dipisahkan	Rp	6.813.331,50
• Pendapatan dari BLUD (RSUD)	Rp	17.608.824.887,00
Jumlah Lain-lain PAD yang sah	Rp	24.152.261.809,03
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp	92.106.752.248,02

1.2 Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp 569.883.066.755,97 merupakan Realisasi yang diperoleh dari :

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak sebesar Rp **28.738.981.151,00** yang terdiri dari :

• Pajak Bumi dan Bangunan	Rp	17.808.183.814,00
• Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 25 dan 29 Orang Pribadi,		
Dan PPh Pasal 21	Rp	10.930.797.337,00

Jumlah Bagi Hasil Pajak **Rp** **28.738.981.151,00**

1.2.1.2 Bagi Sumber Daya Alam sebesar Rp **23.922.050.415,00** terdiri dari :

• Provisi Sumber Daya Hutan	Rp	18.850.809,00
-----------------------------	----	---------------

• Iuran Tetap (Landrent)	Rp	191.898.896,00
• Iuran Eksplorasi dan Eksloitasi (Royalty)	Rp	21.308.235.527,00
• Pungutan Pengusahaan Perikanan	Rp	347.408.873,00
• Pertambangan Minyak Bumi	Rp	<u>2.055.656.310,00</u>
Jumlah Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp	23.922.050.415,00

1.2.1.3 Dana Alokasi Umum sebesar Rp 384.421.523.000,00 terdiri dari :

• Dana Alokasi Umum	Rp	<u>384.421.523.000,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum	Rp	384.421.523.000,00

1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 32.626.040.000,00 terdiri dari :

• Dana Alokasi Khusus	Rp	<u>32.626.040.000,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus	Rp	32.626.040.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp	469.708.594.566,00

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

1.2.2.1 Dana Penyesuaian sebesar Rp 38.203.000.000,00 terdiri dari :

• Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus	Dinas Pendidikan	Rp	<u>38.203.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer			
Pemerintah Pusat-Lainnya		Rp	38.203.000.000,00

1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 39.557.422.289,97 terdiri dari :

• Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp	10.585.898.321,24
• Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		
(BBNKB)	Rp	10.138.756.527,00

• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rp	18.748.785.913,96
• Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	Rp	83.981.536,77
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp	39.557.422.289,97

1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya sebesar Rp 22.413.325.900,30 terdiri dari :

• Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Bangka Belitung	Rp	22.413.325.900,30
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp	22.413.325.900,30
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	Rp	61.970.748.189,97
Jumlah Pendapatan Transfer	Rp	569.883.066.755,97

1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

1.3.1 Pendapatan Hibah sebesar Rp 1.000.000.000,00 terdiri dari :

• Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri	Rp	207.625.470,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	207.625.470,00
Jumlah Pendapatan	Rp	662.197.444.473,99

Lampiran 5

Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Pangkalpinang

Periode 2014

NOMOR	URAIAN	REALISASI (Rp)
1	2	3
1	PENDAPATAN	745.888.134.815,09
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	113.817.278.385,97
1.1.1.	Pendapatan Daerah	52.847.336.511,80
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	16.455.668.909,66
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.039.642.020,30
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	42.474.630.944,21
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	632.070.856.429,12
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	501.293.469.097,00
1.2.1.1.	Dana Bagi Hasil Pajak	21.845.752.927,00
1.2.1.2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	34.110.343.170,00
1.2.1.3.	Dana Alokasi Umum	414.685.923.000,00
1.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus	30.651.450.000,00
1.2.2.	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	55.096.212.000,00
1.2.2.2.	Dana Penyesuaian	55.096.212.000,00
1.2.3.	Transfer Pemerintah Provinsi	75.681.175.332,12
1.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	45.769.318.082,12
1.2.3.2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	29.911.857.250,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-
1.3.1.	Pendapatan Hibah	-
1.3.2.	Pendapatan Dana Darurat	-
1.3.3.	Pendapatan Lainnya	-
JUMLAH		745.888.134.815,09

Sumber : DPPKAD Kota Pangkalpinang Tahun 2017

1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli daerah sebesar Rp 113.817.278.385,97 merupakan Realisasi yang diperoleh dari :

1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp **52.847.336.511,80** yang terdiri dari :

• Pajak Hotel	Rp	1.881.001.636,00
• Pajak Restoran	Rp	4.552.089.423,00
• Pajak Hiburan	Rp	1.896.420.240,00
• Pajak Reklame	Rp	1.734.528.910,50
• Pajak Penerangan Jalan	Rp	13.161.058.345,00
• Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp	3.948.568.445,30
• Pajak Parkir	Rp	178.082.600,00
• Pajak Sarang Burung Walet	Rp	46.130.000,00
• Pajak Air Tanah	Rp	237.572.730,00
• Pajak BPHTB	Rp	16.183.953.337,00
• Pajak Bumi dan Bangunan	Rp	9.027.930.845,00
• Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	Rp	52.847.336.511,80

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp 16.455.668.909,66 yang terdiri dari :

1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

• Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Rp	61.175.000,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Rp	1.150.680.000,00
• Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta		

Catatan Sipil	Rp	26.985.000,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp	549.326.000,00
• Retribusi Pelayanan Pasar	Rp	458.925.000,00
• Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp	650.174.388,00
• Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Rp	40.260.000,00
• Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus	Rp	21.520.000,00
• Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Rp	330.352.668,00
Jumlah Retribusi Jasa Umum	Rp	3.289.398.056,00

1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp	3.372.400.143,66
• Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	Rp	169.000.000,00
• Retribusi Jasa Usaha Pelelangan Ikan	Rp	345.362.200,00
• Retribusi Terminal	Rp	85.890.000,00
• Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir (RSUD)	Rp	45.450.000,00
• Retribusi Pantai Pasir Padi	Rp	152.000.000,00
• Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir (TPI/PPI)	Rp	28.550.000,00

• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Rp	273.850.000,00
• Retribusi Rumah Potong Hewan	Rp	<u>230.535.000,00</u>
Jumlah Retribusi Jasa Usaha	Rp	4.703.037.343,66

1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

• Retribusi Izin Gangguan (SIG)	Rp	3.205.974.500,00
• Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Rp	5.149.199.010,00
• Retribusi Izin Trayek	Rp	80.960.000,00
• Retribusi Jasa Usaha Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Rp	27.100.000,00
Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu	Rp	8.463.233.510,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah	Rp	16.455.668.909,66

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 2.039.642.020,30 yang terdiri dari

• Bagian Laba Atas Penyertaan Modal/ Investasi kepada Pihak Ketiga	Rp	<u>2.039.642.020,30</u>
Jumlah	Rp	2.039.642.020,30

1.1.4 Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 42.474.630.944,21 yang terdiri dari :

• Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	Rp	2.115.000,00
• Jasa Giro Kas Daerah	Rp	3.643.059.015,11
• Penerimaan Bunga Deposito	Rp	3.101.575.474,82
• Pendapatan dari Denda Keterlambatan	Rp	185.110.448,00

• Pendapatan dari Denda Pajak	Rp	436.026.787,76
• Pendapatan dari Denda Retribusi	Rp	98.897.002,89
• Pendapatan dari Pengembalian	Rp	1.752.334.837,65
• Pendapatan dari Kelebihan Penyetoran		
Pajak	Rp	1.533.532,98
Retribusi	Rp	0,00
• Pendapatan dari Kelebihan Penyetoran		
• Hasil Penjualan dari Angsuran/Cicilan		
Rumah Dinas	Rp	551.200,00
• Pendapatan dari BLUD (RSUD)	Rp	29.540.989.965,00
• Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Rp	3.712.437.680,00
Jumlah Lain-lain PAD yang sah	Rp	42.474.630.944,21
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp	113.817.278.385,97

1.2 Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp 632.070.856.429,12 merupakan Realisasi yang diperoleh dari :

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak sebesar Rp **21.845.752.927,00** yang terdiri dari :

• Pajak Bumi dan Bangunan	Rp	10.961.252.100,00
• Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 25 dan 29 Orang Pribadi,		
Dan PPh Pasal 21	Rp	10.884.500.827,00
Jumlah Bagi Hasil Pajak	Rp	21.845.752.927,00

1.2.1.2 Bagi Sumber Daya Alam sebesar Rp 34.110.343.170,00 terdiri dari :

• Provisi Sumber Daya Hutan	Rp	9.013.786,00
• Iuran Tetap (Landrent)	Rp	20.658.270
• Iuran Eksplorasi dan Eksplorasi (Royalty)	Rp	29.812.352.625,00
• Pungutan Pengusahaan Perikanan	Rp	383.182.410,00
• Pertambangan Minyak Bumi	Rp	<u>3.885.136.079,00</u>
Jumlah Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp	34.110.343.170,00

1.2.1.3 Dana Alokasi Umum sebesar Rp 414.685.923.000,00 terdiri dari :

• Dana Alokasi Umum	Rp	<u>414.685.923.000,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum	Rp	414.685.923.000,00

1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 30.651.450.000,00 terdiri dari :

• Dana Alokasi Khusus	Rp	<u>30.651.450.000,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus	Rp	30.651.450.000,00

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan **Rp** **501.293.469.097,00**

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

1.2.2.1 Dana Penyesuaian sebesar Rp 55.096.212.000,00 terdiri dari :

• Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus	Rp	<u>55.096.212.000,00</u>
Dinas Pendidikan	Rp	<u>55.096.212.000,00</u>

Jumlah Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat-Lainnya **Rp** **55.096.212.000,00**

1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp **45.769.318.082,12** terdiri dari :

• Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp	10.528.043.089,91
• Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		

(BBNKB)	Rp	8.552.126.938,16
• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		
(PBBKB)	Rp	23.284.732.909,98
• Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan		
Air Permukaan	Rp	78.171.973,38
• Pajak Rokok	Rp	3.326.243.170,69
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp	45.769.318.082,12

1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya sebesar Rp 29.911.857.250,00 terdiri dari :

• Bantuan Keuangan dari Pemerintah	
Provinsi Bangka Belitung	Rp <u>29.911.857.250,00</u>
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp <u>29.911.857.250,00</u>
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	Rp <u>75.681.175.332,12</u>
Jumlah Pendapatan Transfer	Rp <u>632.070.856.429,12</u>
Jumlah Pendapatan	Rp <u>745.888.134.815,09</u>

Lampiran 6

Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Pangkalpinang

Periode 2015

No.	URAIAN	REALISASI (RP)
1	PENDAPATAN	797.819.738.788,28
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	135.305.782.559,87
3	Pendapatan Pajak Daerah	57.078.721.262,23
4	Pendapatan Retribusi Daerah	16.933.544.415,66
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.314.667.852,53
6	Lain-lain PAD yang sah	56.978.849.029,45
7	PENDAPATAN TRANSFER	662.513.956.228,41
8	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	538.208.270.454,00
9	Dana Bagi Hasil Pajak	17.579.718.100,00
10	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	37.927.273.354,00
11	Dana Alokasi Umum	419.863.119.000,00
12	Dana Alokasi Khusus	62.838.160.000,00
13	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	43.423.684.000,00
14	Dana Otonomi Khusus	-
15	Dana Penyesuaian	43.423.684.000,00
16	Transfer Pemerintah Provinsi	80.882.001.774,41
17	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	63.365.681.774,41
18	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	17.516.320.000,00
19	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-
20	Pendapatan Hibah	-
21	Pendapatan Dana Darurat	-
22	Pendapatan Lainnya	-
	JUMLAH	797.819.738.788,28

Sumber : DPPKAD Kota Pangkalpinang Tahun 2017

1.1 Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli daerah sebesar Rp 135.305.782.559,87 merupakan target yang diperoleh dari :

1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp 57.078.721.262,23 yang terdiri dari :

• Pajak Hotel	Rp	2.298.976.460,00
• Pajak Restoran	Rp	5.066.025.618,00
• Pajak Hiburan	Rp	1.910.184.303,00
• Pajak Reklame	Rp	2.718.778.296,00
• Pajak Penerangan Jalan	Rp	16.003.227.609,00
• Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp	3.591.248.468,43
• Pajak Parkir	Rp	262.820.200,00
• Pajak Sarang Burung Walet	Rp	109.870.000,00
• Pajak Air Tanah	Rp	324.077.850,00
• Pajak BPHTB	Rp	13.933.776.295,80
• Pajak Bumi dan Bangunan	Rp	10.859.736.162,00
• Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	Rp	57.078.721.262,23

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp 16.933.544.415,66 yang terdiri dari :

1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

• Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Rp	64.426.500,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Rp	1.436.220.000,00
• Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta		

Catatan Sipil	Rp	0,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp	702.504.000,00
• Retribusi Pelayanan Pasar	Rp	456.600.000,00
• Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp	556.698.200,00
• Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Rp	43.800.000,00
• Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus	Rp	<u>22.000.000,00</u>
Jumlah Retribusi Jasa Umum	Rp	3.282.248.700,00
1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha		
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp	3.088.072.170,66
• Retribusi Terminal	Rp	81.340.000,00
• Retribusi Tempat Parkir Khusus Pasir Padi	Rp	203.000.000,00
• Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir (TPI/PPI)	Rp	79.560.000,00
• Retribusi Rumah Potong Hewan	Rp	265.310.000,00
• Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	Rp	152.000.000,00
• Retribusi Pelelangan Ikan	Rp	321.295.545,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di RSUD	Rp	42.450.000,00
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Rp	<u>297.350.000,00</u>
Jumlah Retribusi Jasa Usaha	Rp	4.530.377.715,66

1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

(IMB) Rp 5.396.395.000,00

- Retribusi Izin Gangguan (SIG) Rp 3.588.302.000,00

- Retribusi Izin Trayek Rp 90.200.000,00

- Retribusi Jasa Usaha Tempat Penjualan

Minuman Berakohol Rp 14.200.000,00

- Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA

kepada Tenaga Asing Rp 31.821.000,00

- Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi Rp 0,00

Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu Rp **9.120.918.000,00**

Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah Rp **16.933.544.415,66**

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar

Rp 4.314.667.852,53,00 yang terdiri dari

- Bagian Laba Atas Penyertaan Modal/

Investasi kepada Pihak Ketiga Rp 4.314.667.852,53

Jumlah Rp **4.314.667.852,53**

1.1.4 Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 56.978.849.029,45 yang terdiri dari :

- Hasil Penjualan Aset Daerah yang

Tidak dipisahkan Rp 110.000.000,00

- Jasa Giro Kas Daerah Rp 3.305.819.140,14

- Penerimaan Bunga Deposito Rp 6.093.602.912,53

- Denda atas Keterlambatan

Pelaksanaan Pekerjaan	Rp	44.602.832,00
• Pendapatan Denda Pajak	Rp	379.488.671,40
• Pendapatan Denda Retribusi	Rp	147.613.850,00
• Angsuran Cicilan Penjualan	Rp	39.675.180,00
• Pendapatan dari Pengembalian	Rp	1.959.400.657,38
• Pendapatan dari Kelebihan Penyetoran Pajak	Rp	0,00
• Dana Kapitasi JKN	Rp	4.715.786.934,00
• Pendapatan dari BLUD (RSUD)	Rp	40.182.858.852,00
Jumlah Lain-lain PAD yang sah	Rp	56.978.849.029,45
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp	135.305.782.559,87,00

1.2 Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp 662.513.956.228,41 merupakan Realisasi yang diperoleh dari :

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 17.579.718.100,00

yang terdiri dari :

• Pajak Bumi dan Bangunan	Rp	9.821.063.500,00
• PPh Orang Pribadi,	Rp	7.758.654.600,00
Jumlah Bagi Hasil Pajak	Rp	17.579.718.100,00

1.2.1.2 Bagi Sumber Daya Alam sebesar Rp 37.927.273.354,00 terdiri dari :

• Pungutan Pengusahaan Perikanan	Rp	703.264.033,00
----------------------------------	----	----------------

- Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Rp 772.106.300,00
 - Sumber Daya Alam Kehutanan Rp 2.170.365,00
 - Iuran Eksplorasi (Royalty) Rp 36.435.132.822,00
 - Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Landrent) Rp 14.599.834,00
- Jumlah Bagi Hasil Sumber Daya Alam Rp 37.927.273.354,00**

1.2.1.3 Dana Alokasi Umum sebesar Rp 419.863.119.000,00 terdiri dari :

- Dana Alokasi Umum Rp 419.863.119.000,00
- Jumlah Dana Alokasi Umum Rp 419.863.119.000,00**

1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 62.838.160.000,00 terdiri dari :

- Dana Alokasi Khusus Rp 62.838.160.000,00
- **Jumlah Dana Alokasi Khusus Rp 62.838.160.000,00**

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Rp 538.208.270.454,00

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

1.2.2.1 Dana Penyesuaian Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus Dinas Pendidikan sebesar Rp 54.097.479.000,00 terdiri dari :

- Tunjangan Profesi Guru Rp 42.695.184.000,00
- Tambahan Penghasilan Guru PNSD Rp 728.500.000,00

Jumlah Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat-Lainnya Rp 43.423.684.000,00

1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 63.365.681.774,41 terdiri dari :

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 15.571.905.798,98
- Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB)	Rp	9.927.172.375,35
• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		
(PBBKB)	Rp	31.667.124.052,23
• Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan		
Air Permukaan	Rp	139.349.103,23
• Dana Bagi Hasil Pajak Rokok		
	Rp	<u>6.060.130.444,53</u>
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp	63.365.681.774,41

1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya sebesar Rp 41.188.020.000,00 terdiri dari :

• Bantuan Keuangan dari Pemerintah	
Provinsi Bangka Belitung	Rp <u>17.516.320.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp <u>17.516.320.000,00</u>
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	Rp <u>80.882.001.774,41</u>
Jumlah Pendapatan Transfer	Rp <u>662.513.956.228,41</u>
Jumlah Pendapatan	Rp <u>797.819.738.788,28</u>

2.1. Target Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Belanja

Target Anggaran Belanja dan realisasi pengeluaran belanja yang diperoleh DPPKAD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah periode 2013 s.d 2015

Lampiran 7

Komposisi Target Anggaran Pengeluaran Pemerintah Kota Pangkalpinang

Periode 2013

NOMOR	URAIAN	TARGET ANGGARAN (RP)
1	2	3
1	BELANJA	763.835.768.032,42
1.1	BELANJA OPERASI	569.042.262.292,84
1.1.1	Belanja Pegawai	371.830.471.023,54
1.1.2.	Belanja Barang	169.917.017.026,30
1.1.3.	Belanja Bunga	-
1.1.4.	Belanja Subsidi	-
1.1.5.	Belanja Hibah	25.154.360.600,00
1.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	2.140.413.643,00
1.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	-
1.2.	BELANJA MODAL	189.803.818.739,58
1.2.1.	Belanja Tanah	-
1.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	51.424.428.029,58
1.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	56.218.347.714,00
1.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	81.227.523.758,00
1.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	933.519.238,00
1.2.6.	Belanja Aset lainnya	-
1.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.544.604.000,00
1.3.1.	Belanja Tidak Terduga	4.544.604.000,00
1.4.	TRANSFER	445.083.000,00
1.4.1.	Transfer Bagi Hasil ke Desa	445.083.000,00
1.4.1.1.	Bagi Hasil Pajak	-
1.4.1.2.	Bagi Hasil Retribusi	-
1.4.1.3.	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Bantuan Kepada Partai Politik	445.083.000,00
	JUMLAH	763.835.768.032,42

Sumber : DPPKAD Kota Pangkalpinang Tahun 2017

Lampiran 8

Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Pangkalpinang

Periode 2013

NOMOR	URAIAN	REALISASI (RP)
1	2	3
1	BELANJA	643.560.132.766,70
1.1	BELANJA OPERASI	482.549.067.328,32
1.1.1	Belanja Pegawai	332.650.128.079,14
1.1.2.	Belanja Barang	127.394.621.853,18
1.1.3.	Belanja Bunga	-
1.1.4.	Belanja Subsidi	-
1.1.5.	Belanja Hibah	21.148.996.396,00
1.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	1.355.321.000,00
1.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	-
1.2.	BELANJA MODAL	160.649.392.847,38
1.2.1.	Belanja Tanah	-
1.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	38.982.896.714,00
1.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	44.642.004.083,38
1.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	76.504.092.800,00
1.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	520.399.250,00
1.2.6.	Belanja Aset lainnya	-
1.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.827.891,00
1.3.1.	Belanja Tidak Terduga	5.827.891,00
1.4.	TRANSFER	355.844.700,00
1.4.1.	Transfer Bagi Hasil ke Desa (Bantuan kepada Partai Politik)	355.844.700,00
1.4.1.1.	Bagi Hasil Pajak	-
1.4.1.2.	Bagi Hasil Retribusi	-
1.4.1.3.	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Bantuan Kepada Partai Politik	355.844.700,00
	Jumlah	643.560.132.766,70

Sumber : DPPKAD Kota Pangkalpinang Tahun 2017

Lampiran 9

Komposisi Target Anggaran Pengeluaran Pemerintah Kota Pangkalpinang

Periode 2014

NOMOR	URAIAN	TARGET ANGGARAN (RP)
1	2	3
1	BELANJA	881.168.180.008,22
1.1.	BELANJA OPERASI	654.261.540.056,22
1.1.1.	Belanja Pegawai	437.533.443.189,30
1.1.2.	Belanja Barang	194.099.919.416,92
1.1.3.	Belanja Bunga	-
1.1.4.	Belanja Subsidi	-
1.1.5.	Belanja Hibah	17.800.254.000,00
1.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	4.827.923.450,00
1.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	-
1.2.	BELANJA MODAL	224.437.556.952,00
1.2.1.	Belanja Tanah	3.728.661.237,00
1.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	57.209.253.598,00
1.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	63.416.625.683,00
1.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	95.617.226.226,00
1.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.465.790.208,00
1.2.6.	Belanja Aset lainnya	-
1.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.024.000.000,00
1.3.1.	Belanja Tidak Terduga	2.024.000.000,00
1.4.	TRANSFER	445.083.000,00
1.4.1.	Transfer Bagi Hasil ke Desa	445.083.000,00
1.4.1.1.	Bagi Hasil Pajak	-
1.4.1.2.	Bagi Hasil Retribusi	-
1.4.1.3.	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Bantuan Kepada Partai Politik	445.083.000,00
	Jumlah	881.168.180.008,22

Sumber : DPPKAD Kota Pangkalpinang Tahun 2017

Lampiran 10

Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Pangkalpinang

Periode 2014

NOMOR	URAIAN	REALISASI (RP)
1	2	3
1	BELANJA	715.541.603.665,05
1.1.	BELANJA OPERASI	544.645.692.198,05
1.1.1.	Belanja Pegawai	380.395.462.629,84
1.1.2.	Belanja Barang	145.009.806.159,21
1.1.3.	Belanja Bunga	-
1.1.4.	Belanja Subsidi	-
1.1.5.	Belanja Hibah	15.134.049.359,00
1.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	4.106.374.050,00
1.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	-
1.2.	BELANJA MODAL	170.446.721.009,00
1.2.1.	Belanja Tanah	-
1.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	40.771.811.290,00
1.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	37.171.964.259,00
1.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	91.105.643.922,00
1.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.397.301.538,00
1.2.6.	Belanja Aset lainnya	-
1.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.449.090,00
1.3.1.	Belanja Tidak Terduga	8.449.090,00
1.4.	TRANSFER	440.741.368,00
1.4.1.	Transfer Bagi Hasil ke Desa	440.741.368,00
1.4.1.1.	Bagi Hasil Pajak	-
1.4.1.2.	Bagi Hasil Retribusi	-
1.4.1.3.	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Bantuan Kepada Partai Politik	440.741.368,00
	Jumlah	715.541.603.665,05

Sumber : DPPKAD Kota Pangkalpinang Tahun 2017

Lampiran 11

Komposisi Target Anggaran Pengeluaran Pemerintah Kota Pangkalpinang

Periode 2015

NOMOR	URAIAN	TARGET ANGGARAN (RP)
1	2	3
1	BELANJA	993.998.838.491,51
1.1.	BELANJA OPERASI	732.299.740.656,66
1.1.1.	Belanja Pegawai	480.009.547.718,47
1.1.2.	Belanja Barang	234.270.081.347,19
1.1.3.	Bunga	-
1.1.4.	Subsidi	-
1.1.5.	Hibah	16.123.469.500,00
1.1.6.	Bantuan Sosial	1.896.642.091,00
1.2.	BELANJA MODAL	260.899.097.834,85
1.2.1.	Belanja Tanah	5.000.000.000,00
1.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	53.444.977.647,00
1.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	71.376.105.316,85
1.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	109.563.983.825,00
1.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	21.514.031.046,00
1.2.6.	Belanja Aset lainnya	-
1.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	800.000.000,00
1.4.1.	Belanja Tidak Terduga	800.000.000,00
1.4.	TRANSFER	
1.4.1.	TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA	790.000.000,00
1.4.1.1.	Bagi Hasil Pajak	-
1.4.1.2.	Bagi Hasil Retribusi	-
1.4.1.3.	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya (Bantuan Kepada Partai Politik)	790.000.000,00
	Jumlah	994.788.838.491,51

Sumber : DPPKAD Kota Pangkalpinang Tahun 2017

Lampiran 12

Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Pangkalpinang

Periode 2015

NOMOR	URAIAN	REALISASI (RP)
1	2	3
1	BELANJA	808.027.416.873,04
1.1.	BELANJA OPERASI	611.917.346.158,04
1.1.1.	Belanja Pegawai	425.755.935.639,84
1.1.2.	Belanja Barang	170.684.313.498,20
1.1.3.	Bunga	-
1.1.4.	Subsidi	-
1.1.5.	Hibah	14.440.765.120,00
1.1.6.	Bantuan Sosial	1.036.331.900,00
1.2.	BELANJA MODAL	196.105.837.101,00
1.2.1.	Belanja Tanah	4.949.389.000,00
1.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	39.830.277.981,00
1.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	25.605.820.200,00
1.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	106.572.648.687,00
1.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	19.147.701.233,00
1.2.6.	Belanja Aset lainnya	-
1.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.233.614,00
1.3.1.	Belanja Tidak Terduga	4.233.614,00
1.4.	TRANSFER	514.231.573,00
1.4.1.	TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA	
1.4.1.1.	Bagi Hasil Pajak	-
1.4.1.2.	Bagi Hasil Retribusi	-
1.4.1.3.	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya (Bantuan Kepada Partai Politik)	514.231.573,00
	Jumlah	808.541.648.446,64

Sumber : DPPKAD Kota Pangkalpinang Tahun 2017



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Pangkal Pinang

Jl. Pulau Bangka, Komplek Perkamoran dan Penitikaman Terpadu, Provinsi Kep. Bangka Belitung

Telepon: 0717-424986, 437949, Faksimile: 0717-436140, 431315

E-mail: ut-pangkalpinang@ut.ac.id

Nomor : 1266 /UN31.55/LL/2016

Perihal : Izin Pengambilan Data

Surat Izin Pengambilan Data

Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang

Dr. Basuki Rahmat Kecamatan Girimaya

Dalam rangka penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Mahasiswa Pascasarjana

Universitas Terbuka UPBJJ-UT Pangkalpinang, a.n:

NO	NAMA	NIM	JUDUL TAPM
1	LENA MARLENY	500629754	Analisis Penerimaan, Pengeluaran dalam Pengelolaan Keuangan DPPKAD Kota Pangkalpinang Periode 2013 s.d 2015.
2	FIYAR HANTO	500629747	Analisis Rekonsiliasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Kota Pangkalpinang Periode 2011 s.d 2015

Besar harapan kami agar Bapak/Ibu berkenan memberikan izin pengambilan data bagi mahasiswa kami. Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

Adrian Sutawijaya, S.I., M.Si
NIP.197705032002121002



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
BADAN KEUANGAN DAERAH

43054.pdf

Alamat : Jl. Basuki Rahmat Pangkalpinang Telp. (0717) 422534 Fax. (0717) 438260

Pangkalpinang, 10 Mei 2017

Nomor : 900/ /3 /Bakeuda/V/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Keterangan Riset

Kepada
Yth. Kepala Universitas Terbuka
UPBJJ-UT Pangkalpinang
di
PANGKALPINANG

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa Pascasarjana
Universitas Terbuka UPBJJ-UT Pangkalpinang atas :

Nama : LENÄ MARLENY, S.E.
NIM : 500629754
Judul TAPM : Analisis Penerimaan dan Pengeluaran dalam Pengelolaan Keuangan
DPPKAD Kota Pangkalpinang Periode 2013 s.d. 2015

Telah selesai mengambil data mengenai Laporan Keuangan pada Badan Keuangan
Daerah Kota Pangkalpinang pada Bulan November 2016 sampai dengan 11 April 2017.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PIT. KEPALA BADAN,
BADAN KEUANGAN DAERAH
ISKANDAR AIDUL FITRI, S.E.
PEMBINA
NIP. 196801031990031003